



# RENSTRA

## RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Pondokmelati  
Kota Bekasi

**2025 - 2029**



[www.kec.pondokmelati.bekasikota.go.id](http://www.kec.pondokmelati.bekasikota.go.id)



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kecamatan Pondokmelati selama lima tahun ke depan. Rancangan Awal Renstra ini dirancang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta memperhatikan potensi, permasalahan, dan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati.

Rancangan Awal Renstra ini mencerminkan komitmen kami dalam mewujudkan Kecamatan Pondokmelati yang lebih maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan bagi seluruh aparatur dan pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta sebagai instrumen untuk mengukur pencapaian kinerja pemerintahan kecamatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra ini, mulai dari instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan masukan dan dukungan. Semoga Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Pondokmelati, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan di Kecamatan Pondokmelati.

Bekasi, 2025

**Camat Pondokmelati,**



**Heryanto, A.P., M.Si.**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19750717 199603 1 003



DAFTAR ISI

|                |                                                                                                           |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | Kata Pengantar                                                                                            | i         |
|                | Daftar Isi                                                                                                | ii        |
|                | Daftar Tabel                                                                                              | iii       |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1            | Latar Belakang                                                                                            | 1         |
| 1.2            | Landasan Hukum                                                                                            | 2         |
| 1.3            | Maksud dan Tujuan                                                                                         | 5         |
| 1.4            | Sistematika Penulisan                                                                                     | 6         |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                                | <b>8</b>  |
| 2.1            | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah                                                                       | 8         |
| 2.1.1          | Tugas, Fungsi Dan Struktur Perannngkat Daerah                                                             | 8         |
| 2.1.2          | Sumber Daya Kecamatan Pondokmelati                                                                        | 14        |
| 2.1.3          | Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan Pondokmelati                                                             | 19        |
| 2.1.4          | Kelompok Sasaran Layanan                                                                                  | 21        |
| 2.1.5          | Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan                                                          | 22        |
| 2.1.6          | Dukungan Bumd Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah                                            | 24        |
| 2.1.7          | Kerja Sama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah                                            | 25        |
| 2.2            | Permasalahann Dan Isu Strategis Perangkat Daerah                                                          | 26        |
| 2.2.1          | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah                                                                   | 26        |
| 2.2.2          | Isu Strategis                                                                                             | 28        |
| 2.2.3          | Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat                                                      | 29        |
| 2.2.4          | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pondokmelati                                       | 29        |
| 2.2.5          | Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati                                                                      | 30        |
| <b>BAB III</b> | <b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                                       | <b>32</b> |
| 3 .1           | Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029                                         | 32        |
| 3.2            | Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029 | 39        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                  | <b>44</b> |
| 4.1            | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan                                                                           | 44        |
| 4.2            | Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan                                                                     | 55        |
|                | 4.2.1 Indikator Kinerja Utama                                                                             | 55        |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>                                                                                            | <b>56</b> |



DAFTAR TABEL

|           |                                                                                           |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah pegawai kecamatan pondokmelati berdasarkan Jabatan                                 | 16 |
| Tabel 2.2 | Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Pondokmelati                                            | 17 |
| Tabel 2.3 | Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan                                      | 17 |
| Tabel 2.4 | Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pondokmelati                                          | 18 |
| Tabel 2.5 | Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020 – 2024                                               | 19 |
| Tabel 2.6 | Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati                                                      | 31 |
| Tabel 3.1 | Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pondokmelati                                         | 36 |
| Tabel 3.3 | Penahapan Renstra PD                                                                      | 41 |
| Tabel 3.4 | Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd | 44 |
| Tabel 4.2 | Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah                          | 46 |
| Tabel 4.3 | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD                                                  | 51 |
| Tabel 4.4 | Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah        | 59 |
| Tabel 4.5 | Indikator Kinerja Utama PD                                                                | 60 |
| Tabel 4.6 | Indikator Kinerja Kunci PD                                                                | 61 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kecamatan Pondokkelati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Kecamatan Pondokkelati berfungsi sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka menjalankan peran tersebut, diperlukan sebuah perencanaan strategis yang terarah dan terpadu, sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokkelati Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan wilayah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Pondokkelati sesuai dengan potensi dan tantangan yang ada.

Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang menjadi pedoman pembangunan di tingkat kota. Renstra ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat Kecamatan Pondokkelati.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Kecamatan Pondokkelati Tahun 2025-2029 melibatkan berbagai pihak,

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokkelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



termasuk aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat, guna memastikan bahwa rencana yang dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

Dengan tersusunnya Renstra ini, Pemerintah Kecamatan Pondokmelati berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata.

### **1.2. Landasan Hukum**

Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 disusun atas:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
- g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



- Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan;
- o. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 2029;
  - p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
  - q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
  - r. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
  - s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7); dan
  - t. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12).
  - u. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
  - v. Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Pondokkelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pondokkelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik:** Memberikan layanan yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan harapan warga Kecamatan Pondokkelati.
2. **Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum:** Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur serta fasilitas umum untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
3. **Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan:** Menjamin bahwa semua kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
4. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:** Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta pengambilan keputusan.
5. **Pengembangan Ekonomi Lokal:** Meningkatkan potensi ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang berkembang di Kecamatan Pondokkelati.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokkelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



6. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya.
7. **Pengelolaan Lingkungan:** Melaksanakan program-program yang berfokus pada pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, dan penciptaan ruang terbuka hijau yang berkualitas.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Pondokmelati 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang penyusunan, dasar hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyajian dokumen.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONDOKMELATI DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi penjelasan terkait gambaran umum Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah. Serta Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**  
Membahas dan menjabarkan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Serta memuat Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pondokmelati dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati;

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



## PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Juga memuat indikator kinerja Kunci Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi dari laporan rencana strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Keuangan. Dalam rangka terwujudnya motto Kecamatan Pondokmelati “Pondokmelati Menyala Bosku” apabila diartikan “Menyenangkan dalam Pelayanan”, kami berkomitmen untuk:

- ☒ Cepat & Responsif – Layanan tanpa ribet, langsung tuntas
- ☒ Ramah & Humanis – Senyum, sapa, dan solusi untuk semua
- ☒ Inovatif & Mudah – Pelayanan modern yang gampang diakses
- ☒ Transparan & Akuntabel – Jujur, terbuka, dan bisa dipercaya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat .
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



- 4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang ketentraman dan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pondokmelati sebagai ujung tombak pelayanan maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

**a. Tupoksi Camat**

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Camat adalah mengkoordinasikan seluruh seksi yang berada dalam kewenangannya termasuk didalamnya Kelurahan, sehingga bagaimana perjalanan kebijakan Kecamatan selalu bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi. Terkait pelaksanaan kebijakan ditingkat Kecamatan menyesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi wilayah tersebut. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

**b. Tupoksi Sekretaris Kecamatan**

Tupoksi utama dari sekretaris Kecamatan adalah membantu Camat dalam bidang kesekretariatan, baik kesekretariatan internal maupun eksternal tentunya dengan tetap mengacu pada hasil koordinasi yang dilakukan Camat. Mencakup didalamnya bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, sehingga perlu adanya penanganan yang

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



khusus dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada pada masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Pendekatan komunikasi secara berjenjang sangat direkomendasikan dalam menyikapi isu – isu dan permasalahan yang berkembang, namun pemberian pemahaman yang detail pada suatu permasalahan merupakan salah satu upaya yang disarankan, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi faktor utama keberhasilan pelayanan kepada masyarakat.

**c. Tupoksi Seksi Pemerintahan**

Miniatur kinerja Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan bisa terbaca dalam pelayanan kependudukan, sehingga kemampuan dan perilaku aparatur menjadi gambaran terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan karakter dan perbaikan metode pelayanan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat akan sangat merasa puas apabila dapat terlayani dengan baik dan prima.

**d. Tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sebagai penegak pelaksanaan Perda, maka jumlah, kapasitas, kemampuan, sikap dan perilaku menjadi faktor utama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang ada dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, artinya bahwa setiap sumber daya aparatur harus memahami bentuk – bentuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana memahami masyarakat pinggiran terhadap pelaksanaan Perda, sehingga meminimalisir kesalah pahaman terhadap penerapan Perda kepada masyarakat.

**e. Tupoksi Seksi Kesejahteraan Sosial**

Kompleksistas permasalahan perangkat daerah tidak luput dari permasalahan sosial yang ada didalam masyarakat, kembali pada bagaimana kapasitas sumber daya aparatur dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Bagaimana sumber daya aparatur melihat permasalahan utama yang sebenarnya terjadi didalam masyarakatnya, bagaimana menghadapi heterogenitas masyarakat

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



dan bagaimana kepekaan dan kepedulian sumber daya aparatur kepada masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang wajib dicarikan solusinya. Salah satu permasalahan diwilayah yang membutuhkan penanganan yang intensif adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam bidang perekonomian.

**f. Tupoksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Bagaimana memastikan perencanaan pembangunan sarana prasarana/insfrastruktur yang berkelanjutan mempunyai dampak langsung yang dirasakan warga masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitasi musrenbang tingkat Kecamatan, jaring aspirasi (Reses) maupun usulan langsung masyarakat kepada Perangkat Daerah/ Stakeholder merupakan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga optimalisasi pembangunan yang tepat sasaran dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**g. Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe. Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar. Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- b. Kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil, Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati terdiri dari :

**a. Kecamatan :**

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Pemerintahan.

**b. Kelurahan :**

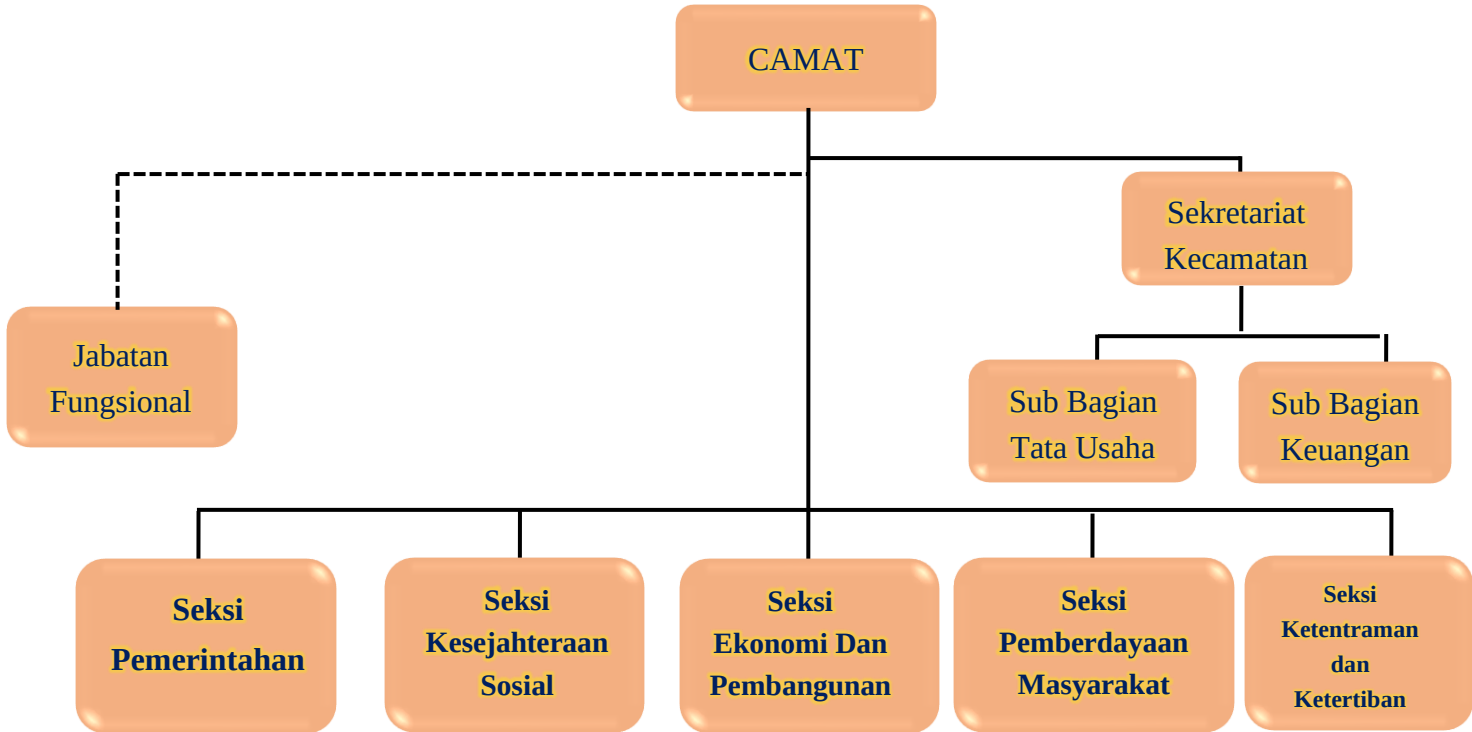
Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi diantaranya :

- 1 . Lurah;
- 2. Sekretaris Kelurahan;
- 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati



Sumber :Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati, diolah

Sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. selaku pemimpin unit kerja dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usulan atau rekomendasi Sekretaris Daerah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan.

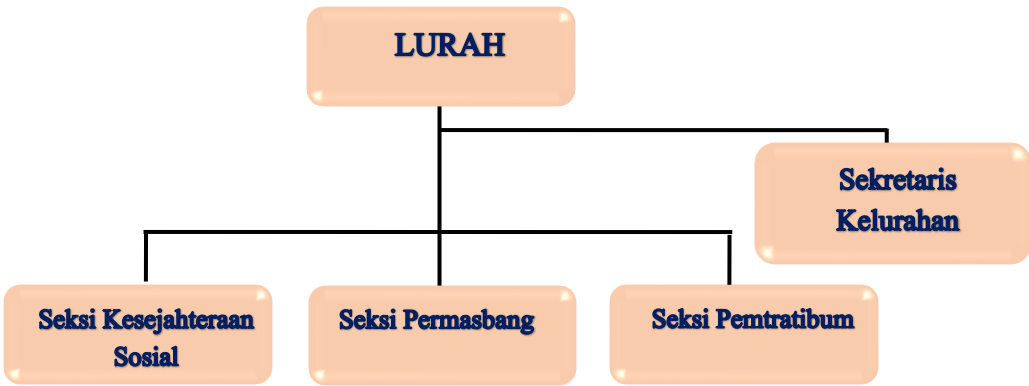
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, maka susunan organisasi kelurahan terdiri atas :

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



- Lurah;
- Sekretaris Kelurahan;
- Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber :Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati, diolah

Adapun Kelurahan di Kecamatan Pondokmelati adalah :

1. Kelurahan Jatimurni;
2. Kelurahan Jatiwarna;
3. Kelurahan Jatimelati;
4. Kelurahan Jatimurni.

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PONDOKMELATI

Kecamatan Pondokmelati merupakan salah satu kecamatan di Kota Bekasi yang memiliki beragam sumber daya, baik dari aspek manusia, infrastruktur, maupun potensi ekonomi. Dengan luas wilayah sekitar 1.179,925 Ha (11,48 km<sup>2</sup>), kecamatan ini terdiri dari empat kelurahan, yaitu Jatimelati, Jatirahayu, Jatimurni dan Jatiwarna, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi tersendiri.

1. Sumber Daya Manusia

Pondokmelati memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang dengan komposisi demografi yang beragam. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perdagangan, jasa dan industri, serta terdapat pula kelompok masyarakat yang bergerak di bidang

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tingkat pendidikan masyarakat juga cukup baik, didukung oleh keberadaan berbagai lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas, serta pusat pelatihan keterampilan.

2. **Infrastruktur dan Fasilitas Publik**

Sebagai bagian dari Kota Bekasi, Pondokmelati memiliki infrastruktur yang terus berkembang. Beberapa sumber daya infrastruktur utama meliputi:

- **Jalan dan Transportasi:** Tersedianya akses jalan utama dan jalan lingkungan yang menghubungkan berbagai wilayah dalam kecamatan serta ke daerah sekitar seperti Daerah Khusus Jakarta.
- **Fasilitas Pendidikan:** Terdapat sekolah negeri dan swasta, serta madrasah yang mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat.
- **Kesehatan:** Keberadaan puskesmas, klinik dan rumah sakit terdekat memberikan akses layanan kesehatan yang memadai.
- **Sarana Ibadah:** Tersedia masjid, mushola, serta tempat ibadah lain yang mendukung kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.
- **Fasilitas Sosial dan Ekonomi:** Pasar tradisional, minimarket, serta pusat perbelanjaan mendukung aktivitas ekonomi warga.

3. **Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Kecamatan Pondokmelati memiliki sektor ekonomi yang berkembang dengan didominasi oleh perdagangan dan jasa. Keberadaan UMKM menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dapat terus dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan berbagai pihak. Selain itu, Pondokmelati masih memiliki beberapa kawasan hijau dan lahan terbuka yang berpotensi dikembangkan untuk ruang hijau, pertanian urban, serta kegiatan berbasis lingkungan.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



4. Sumber Daya Sosial dan Budaya

Masyarakat Pondokmelati memiliki kehidupan sosial yang harmonis dengan adanya berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan kelompok masyarakat (Pokmas) yang aktif dalam berbagai bidang, seperti sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Kegiatan budaya dan tradisi lokal juga masih dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yaitu pelayanan masyarakat yang prima serta menjalankan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien sebagai perangkat daerah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja.

Pemerintah Kecamatan Pondokmelati didukung unit kerja sebanyak 4 (empat) Kelurahan. oleh sebanyak 140 orang pegawai, terdiri dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 96 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), SDM Kecamatan Pondokmelati terdiri dari:

Tabel 2.1 Jumlah pegawai kecamatan pondokmelati berdasarkan Jabatan

| No. | Jabatan                | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------------------|--------|------------|
| 1.  | Camat                  | 1      | Orang      |
| 2.  | Sekretaris Kecamatan   | 1      | Orang      |
| 3.  | Lurah                  | 4      | Orang      |
| 4.  | Kepala Seksi Kecamatan | 5      | Orang      |
| 5.  | Sekretaris Kelurahan   | 4      | Orang      |
| 6.  | Kepala Seksi Kelurahan | 12     | Orang      |
| 7.  | Kepala Sub Bagian      | 2      | Orang      |
| 8.  | Staff Pelaksana        | 15     | Orang      |
|     | Jumlah                 | 44     | Orang      |

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Tabel 2.2 Data Pendidikan Pegawai Kecamatan Pondokmelati

| SDM                        | Jumlah | Pendidikan Terakhir |    |    |       |     |     |
|----------------------------|--------|---------------------|----|----|-------|-----|-----|
|                            |        | S3                  | S2 | S1 | D3/D4 | SMA | SMP |
| Pejabat struktural         | 29     | -                   | 6  | 22 | 1     | -   | -   |
| PNS                        | 15     | -                   | -  | 5  | 2     | 6   | 2   |
| PPPK                       | 79     | -                   | -  | 24 | 8     | 47  | -   |
| Tenaga Kontrak Kerja (TKK) | 17     | -                   | -  | 4  | 2     | 11  | -   |
| Jumlah                     | 133    | -                   |    |    |       |     | -   |

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

| No. | Pangkat            | Golongan | Jumlah | Keterangan |
|-----|--------------------|----------|--------|------------|
| 1.  | Pembina Tk.I       | IV/b     | 1      | Orang      |
| 2.  | Pembina            | IV/a     | 3      | Orang      |
| 3.  | Penata Tk.I        | III/d    | 18     | Orang      |
| 4.  | Penata             | III/c    | 5      | Orang      |
| 5.  | Penata Muda Tk. 1  | III/b    | 3      | Orang      |
| 6.  | Penata Muda        | III/a    | 4      | Orang      |
| 7.  | Pengatur Tk.I      | II/d     | 5      | Orang      |
| 8.  | Pengatur           | II/c     | 1      | Orang      |
| 9.  | Pengatur Muda Tk.I | II/b     | 1      | Orang      |
| 10. | Pengatur Muda      | II/a     | 1      | Orang      |
| 11. | P3K                | -        | 79     | Orang      |

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

Berdasar tabel tersebut bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Pondokmelati telah sebagian memenuhi kompetensi dalam pelayanan kepada warga masyarakat.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

*Rancangan Awal*  
*Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati*  
*Tahun 2024 - 2026*



pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Pondokmelati.

Tabel 2.4 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pondokmelati

| No  | Jenis/Nama Barang     | Kecamatan | Kelurahan | Kondisi |       | Jumlah  |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|---------|-------|---------|
|     |                       |           |           | Baik    | Rusak |         |
| 1.  | Gedung Kantor         | 2 Unit    | 4 Unit    | 6       |       | 6 Unit  |
| 2.  | Musholah              | 1 Unit    | 4 Unit    | 5       |       | 5 Unit  |
| 3.  | Rumah Dinas           | -         | -         | -       | -     | -       |
| 4.  | Kendaraan Roda 4      | 4 Unit    | 8 Unit    | 12      | -     | 12 Unit |
| 5.  | Kendaraan Roda 2      | 6 Unit    | 8 Unit    | 14      | -     | 14 Unit |
| 6.  | Sepeda ontel          | -         | -         | -       | -     | -       |
| 7.  | Komputer Administrasi | 22 Unit   | 22 Unit   | √       |       | 44 Unit |
| 8.  | Komputer SIAK         | 5 Unit    | -         | √       |       | -       |
| 9.  | Printer               | 12 Unit   | 8 Unit    | √       |       | 36 Unit |
| 10. | Mesin Ketik           | 1 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 5 Unit  |
| 11. | Televisi              | 3 Unit    | 8 Unit    | √       |       | 11 Unit |
| 12. | Wirreless             | 4 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 4 Unit  |
| 13. | Air Conditioner       | 12 Unit   | 16 Unit   | 23      | 5     | 23 Unit |
| 14. | Amplifier             | 1 Unit    | 4 Unit    | √       | √     | 5 Unit  |
| 15. | Hom TOA               | -         | -         | -       | -     | -       |
| 16. | Pesawat Telepon       | 1 Unit    | 4 Unit    | √       | √     | 1 Unit  |
| 17. | Faximile              | 1 Unit    | -         | -       | √     | 1 Unit  |
| 18. | Brankas               | -         | -         | -       | -     | -       |
| 19. | Filling Kabinet       | 7 Unit    | 16 Unit   | √       |       | 23 Unit |
| 20. | Almari Kayu           | 3 Unit    | 12 Unit   | √       |       | 14 Unit |
| 21. | Almari Kaca           | 1 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 5 Unit  |
| 22. | Almari Arsip          | 5 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 5 Unit  |
| 23. | Meja Kerja            | 25 Unit   | 22 Unit   | √       |       | 47 Unit |
| 24. | Meja Rapat            | 2 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 6 Unit  |
| 25. | Meja Komputer         | 22 Unit   | 16 Unit   | √       |       | 38 Unit |
| 26. | Kursi Kerja           | 25 Unit   | 22 Unit   | √       |       | 47 Unit |
| 27. | Kursi Lipat           | 10 Unit   | 40 Unit   | √       |       | 50 Unit |
| 28. | Kursi Rapat Lipat     | -         | -         | -       | -     | -       |
| 29. | Dispenser             | 4 Unit    | 4 Unit    | 6       | 2     | 8 Unit  |
| 30. | Kamera Digital        | -         | -         |         |       | -       |
| 31. | Laptop                | 3 Unit    | 8 Unit    | √       |       | 11 Unit |
| 32. | Kipas Angin           | 4 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 8 Unit  |
| 33. | Pesawat Telepon       | 1 Unit    | 1 Unit    | √       |       | 2 Unit  |
| 34. | Genset                | -         | 4 Unit    | √       |       | 5 Unit  |

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



| No  | Jenis/Nama Barang | Kecamatan | Kelurahan | Kondisi |       | Jumlah |
|-----|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|
|     |                   |           |           | Baik    | Rusak |        |
| 35. | Mesin Presensi    | 1 Unit    | 4 Unit    | √       |       | 5 Unit |
| 36. | Kendaraan Roda 3  | 1 Unit    | 4 Unit    | -       | 5     | 5 Unit |
| 37. | Proyektor         | 1 Unit    | -         | √       |       | 1 Unit |

Sumber : Dokumen Pengelola Barang Milik Daerah Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025, diolah

2.1.3. KINERJA PELAYANAN PADA KECAMATAN PONDOKMELATI

Kecamatan Pondokmelati terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Kinerja pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam upaya memenuhi harapan masyarakat, Kecamatan Pondokmelati secara konsisten melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan, baik dari sisi prosedur, penyelesaian waktu, maupun kemudahan akses. Penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil telah menjadi landasan dalam setiap aspek pelayanan.

Selain itu, Kecamatan Pondokmelati juga secara aktif mendorong inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi, seperti pemanfaatan aplikasi digital, pelayanan data integrasi, serta penyediaan saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kinerja Kecamatan Pondokmelati diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2020 – 2024

| NO | Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah                                 | Target NSP | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- |         |        |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|-----------------------------|-------|------|------|------------------------------|---------|--------|------|
|    |                                                                                            |            |            |                          | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                        | 2022  | 2023 | 2024 | 2021                         | 2022    | 2023   | 2024 |
| 1  | Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati                                                          |            |            |                          | 75                           | 76,5 | 77   |      | 75.09                       | 75.09 | 75,1 |      | 100.09%                      | 98.09%  | 97,59% |      |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik                                         |            |            |                          | 81                           | 82   | 83   |      | 87.66                       | 83.51 | 95,2 |      | 108%                         | 101,83% |        |      |
| 3  | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati |            |            |                          | 60                           | 60   | 60%  |      | 60                          | 68,8  | 60%  |      | 100%                         | 114,58% | 100%   |      |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

Rancangan Awal  
Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati  
Tahun 2024 - 2026



| NO | Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra OPD Tahun ke- |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |       | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |         |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|-------|------------------------------|------|------|---------|
|    |                                                            |             |            |                          | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024  | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024    |
| 4  | Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib                 |             |            |                          | 58%                          | 60%  | 65%  |      | 58%                         | 60%  | 65%  |       | 100%                         | 100% | 100% |         |
| 5  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik         |             |            |                          |                              |      |      | 81   |                             |      |      | 84,94 |                              |      |      | 104,87% |
| 6  | Nilai Auntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)       |             |            |                          |                              |      |      | 75   |                             |      |      | 75,1  |                              |      |      | 100,19% |
| 7  | Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib                 |             |            |                          |                              |      |      | 60%  |                             |      |      | 60%   |                              |      |      | 100%    |

Sumber : Dokumen LAKIP Tahun 2020-Tahun 2024, diolah

Penjelasan dari table diatas, selama kurun waktu empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2024, Kecamatan Pondokmelati menunjukkan kinerja yang cukup stabil dan cenderung meningkat dalam berbagai aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, adanya perubahan RPJMD pada Tahun 2021 dan berakhirnya periode Renstra Tahun 2018–2023 memberikan implikasi terhadap arah kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk kecamatan. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian terhadap sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kecamatan perlu melakukan penyesuaian dokumen perencanaan, termasuk dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang baru. Berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, mayoritas capaian berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang direncanakan. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) misalnya, mengalami lonjakan hingga 125% pada tahun 2020, menunjukkan adanya optimalisasi peran kecamatan dalam melaksanakan fungsinya. Hal ini juga didukung oleh peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik yang mencapai angka tertinggi 114,66% pada tahun 2023. Capaian indikator lainnya seperti persentase zonasi wilayah tertib, bersih, dan indah, serta peningkatan wilayah yang tertib juga menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100% setiap tahunnya. Indikator pemberdayaan masyarakat pun memperlihatkan tren yang baik, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 114,58%, mencerminkan keberhasilan program partisipatif yang dijalankan pemerintah kecamatan bersama masyarakat. Sementara itu, capaian

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) cenderung stabil meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 97,59%, sehingga menjadi satu-satunya indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan ke depan. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Pondokmelati telah berhasil menjaga kinerja pelayanan publik dan pembangunan wilayah secara konsisten dan terukur. Dengan tetap mempertahankan indikator yang sudah kuat dan melakukan perbaikan pada aspek akuntabilitas, Kecamatan Pondokmelati berpotensi menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif di tingkat wilayah. Secara keseluruhan, evaluasi ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Keberhasilan ini menjadi indikasi bahwa tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif terus dikembangkan, dengan peningkatan pelayanan publik dan sistem akuntabilitas yang lebih baik.

**2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN**

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik mengandung sendi-sendi:

- a. Kesederhanaan pelayanan meliputi prosedur yang mudah, cepat, dan mudah dilaksanakan;
- b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan public;
- c. Kepastian waktu Artinya pelayanan publik dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku;
- d. Akurasi yang berarti bahwa produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. Keamanan pada proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f. Tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik atau pegawai yang ditunjuk, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



- g. Kenyamanan lingkungan pelayanan yang harus tertib, nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

Dari penjelasan diatas, bahwa kelompok sasaran pelayanan pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah warga Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi itu sendiri. Pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mendapat pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi masyarakat melalui kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati. Pada proses terselenggaranya pelayanan kepada publik, Kecamatan Pondokmelati terdapat beberapa unsur yang berperan dalam hal dimaksud, diantaranya Babinsa dari Koramil Pondokgede, Bimaspol dari Polsek Pondokgede, UPP Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UPTD Pendapatan, UPTD LH, UPTD Parkir dan Restribusi. Sedangkan Kerjasama dalam peningkatan pembangunan Kecamatan Pondokmelati didukung oleh DBMSDA Kota Bekasi dan Diperkimtan Kota Bekasi.

**2.1.5 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN**

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Pondokmelati berkoordinasi dengan berbagai mitra perangkat daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi, kelurahan, serta lembaga masyarakat seperti LPMK, Karang Taruna, dan Forum Komunikasi Kecamatan (FKK), untuk memastikan pelayanan yang efektif dan responsif. Kolaborasi ini mencakup bidang administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan masalah sosial, dengan mengacu pada kebijakan Pemkot Bekasi serta melibatkan partisipasi aktif warga melalui forum Musrenbang. Sinergi ini memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan sekaligus mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah. Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, Kecamatan Pondokmelati

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



melakukan koordinasi teknis dan operasional dengan perangkat daerah terkait, yaitu:

**1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil):**

- o Pelaksanaan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el melalui mobil layanan keliling atau pelayanan jemput bola.
- o Fasilitasi pengelolaan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian.
- o Penguatan data kependudukan sebagai dasar validasi dalam pelayanan lainnya.

**2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda):**

- o Penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui loket pelayanan terpadu atau giat layanan keliling.
- o Sosialisasi dan edukasi perpajakan daerah kepada masyarakat, khususnya dalam masa jatuh tempo pembayaran.
- o Sinkronisasi data objek pajak dengan data kependudukan untuk validasi dan pemutakhiran database.

**3. Dinas Pendidikan (Disdik):**

- o Koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- o Pendataan anak usia sekolah yang tidak/belum terdaftar sebagai peserta didik untuk intervensi program pendidikan.
- o Dukungan terhadap program kejar paket dan pendidikan inklusif di wilayah kecamatan.

**4. Dinas Kesehatan (Dinkes):**

- o Pelaksanaan kegiatan Posyandu, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Puskesmas.
- o Penanganan kasus penyakit menular (DBD, TBC, COVID-19) melalui pelaporan dan koordinasi lintas sektor.
- o Program penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala terhadap kelompok rentan (balita, lansia, ibu hamil).

**5. Dinas Perhubungan (Dishub)**

**6. Dinas Lingkungan Hidup (Dis. LH)**

**7. DPMPTSP**

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



- 8. DBMSDA
- 9. DISPERKIMTAN
- 10. Satuan Polisi Pamong Praja

Koordinasi dengan Unit-unit perangkat daerah ini dilakukan secara rutin melalui forum lintas sektor, rapat teknis, dan pelaporan berbasis aplikasi atau sistem informasi yang tersedia. Model kerja kolaboratif ini mendukung percepatan pelayanan, efisiensi waktu, serta peningkatan kualitas intervensi kebijakan di tingkat kecamatan.

2.1.6 DUKUNGAN BUMD DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sebenarnya dibentuk oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, bukan kecamatan. Jadi, tidak ada BUMD yang langsung berada dalam lingkup kewenangan kecamatan. Namun, BUMD dapat beroperasi atau memiliki cabang/unit layanan di wilayah kecamatan. Berikut beberapa contoh BUMD Kota Bekasi yang mungkin memiliki unit layanan atau pengaruh di lingkup Kecamatan Pondokmelati :

BUMD Kota Bekasi yang Relevan di Lingkup Kecamatan:

- 1. **Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi**
  - o Jenis : BUMD Air Minum
  - o Peran di kecamatan: Pelayanan air bersih untuk rumah tangga dan pelaku usaha.
- 2. **PD Mitra Patriot**
  - o Jenis : Jasa konstruksi, pengelolaan parkir, kebersihan, dan lingkungan
  - o Peran di kecamatan: Bisa terlibat dalam pengelolaan parkir atau kebersihan di fasilitas umum tingkat kecamatan, meskipun pelaksanaannya tetap di bawah koordinasi kota.
- 3. **Bank BJB (Bank Jabar Banten)** – meskipun ini BUMD provinsi, namun:
  - o Peran di kecamatan: Biasanya menjadi mitra pembayaran PBB, gaji ASN, dan layanan keuangan lainnya di kecamatan.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



4. PD BPRS Patriot Bekasi

- o BPRS Patriot Bekasi dengan bidang usaha perbankan syariah ini memiliki ruang lingkup usaha yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha mikro atau kecil; melakukan penyaluran dana; melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS Patriot Bekasi; memberikan jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan mengelola kegiatan dana sosial berupa zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS dan wakaf tunai).

Sebagai catatan penting, Kecamatan tidak membentuk atau mengelola BUMD, namun berkoordinasi dengan BUMD dalam penyelenggaraan layanan publik. Keberadaan unit pelayanan BUMD di kecamatan (seperti kantor PDAM atau loket pembayaran PBB) bersifat penugasan operasional, bukan struktural.

2.1.7 KERJA SAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PERANGKAT DAERAH

Meskipun secara struktural kecamatan bukanlah perangkat daerah otonom yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan kerja sama daerah, namun dalam praktiknya kecamatan dapat berperan sebagai pelaksana teknis, fasilitator, atau koordinator wilayah dalam mendukung kerja sama lintas sektor. Hal ini sesuai dengan kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah yang membantu wali kota atau bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi lintas wilayah. Kecamatan dapat terlibat dalam pelaksanaan kerja sama antarinstansi, seperti kegiatan pelayanan terpadu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kerja sama donor darah bersama PMI, ataupun koordinasi lintas kecamatan dalam penanganan kebencanaan dan ketertiban umum. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi yang tidak berbentuk kerja sama formal antar daerah, namun dijalankan atas dasar kebutuhan pelayanan masyarakat yang lintas wilayah.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokkelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Selain itu, kecamatan juga dapat memfasilitasi kerja sama antara unit kelurahan dengan BUMD, BUMDesa, ataupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama antar daerah secara formal, karena kewenangan tersebut berada di tingkat kepala daerah atau perangkat daerah yang memiliki kedudukan sebagai SKPD. Dengan demikian, meskipun kecamatan bukan pengambil keputusan utama dalam kerja sama daerah, keberadaannya sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan teknis di lapangan, yang menjembatani kepentingan antar instansi, wilayah, dan masyarakat.

2.2 PERMASALAHANN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi nyata (realita) yang muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara capaian pembangunan saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Dalam konteks Kecamatan Pondokmelati, rumusan permasalahan ini disusun berdasarkan hasil analisis deskriptif dan diagnosis yang telah diuraikan pada Bab II, dengan memperhatikan aspek pelayanan publik, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan. Beberapa permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1. Masih terbatasnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan secara digital, yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama lansia dan warga dengan keterbatasan akses teknologi.
- 2. Kondisi infrastruktur jalan lingkungan dan drainase yang belum merata kualitasnya, mengakibatkan rawan banjir di beberapa titik permukiman saat musim hujan.
- 3. Belum optimalnya kolaborasi antar lembaga pelayanan dasar, seperti Dinas Kesehatan, Disdik, dan Disdukcapil, dalam penyediaan layanan terintegrasi di tingkat kecamatan.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat RW dan kelurahan.
5. Kesenjangan antara kebutuhan pelayanan dasar dengan kapasitas SDM dan sarana pendukung di tingkat kelurahan, yang berdampak pada keterbatasan responsivitas terhadap permasalahan masyarakat.

Beberapa faktor berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Pondokmelati. Dengan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut:

**Kekuatan (Strenght):**

Kecamatan Pondokmelati memiliki kekuatan pada letaknya yang strategis di perbatasan dengan DKI Jakarta, sehingga berperan sebagai pintu gerbang aktivitas masyarakat antara Kota Bekasi dan Ibukota. Kondisi wilayah yang relatif masih memiliki ruang terbuka dibandingkan kawasan kota mendukung terciptanya lingkungan yang lebih asri dan nyaman, sekaligus memberikan potensi pengembangan permukiman serta pelayanan publik yang lebih terjangkau.

**Kelemahan (Weakness):**

Kelemahan yang dihadapi Kecamatan Pondokmelati adalah keterbatasan aksesibilitas transportasi massal, karena belum terhubung dengan jaringan kereta commuter line, serta tidak adanya kawasan industri dan komersial besar yang dapat menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Hal ini menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada wilayah sekitar untuk bekerja maupun memenuhi kebutuhan layanan ekonomi berskala besar.

**Peluang (Opportunity):**

Pondokmelati memiliki peluang untuk mengembangkan diri sebagai kawasan pemukiman yang nyaman dengan fasilitas sosial, budaya, dan pelayanan publik yang semakin baik, mengingat posisinya dekat dengan Jakarta. Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan,

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



seperti jalan, transportasi umum, serta digitalisasi pelayanan publik, dapat membuka peluang menarik investasi kecil dan menengah yang sesuai dengan karakter wilayah pemukiman.

**Ancaman (Threat):**

Ancaman yang dapat muncul adalah meningkatnya arus urbanisasi dari Jakarta dan wilayah sekitarnya yang berpotensi menimbulkan kepadatan penduduk, tekanan terhadap ruang terbuka hijau, serta meningkatnya kebutuhan layanan dasar. Selain itu, ketergantungan terhadap pusat ekonomi di luar wilayah Pondokmelati dapat memperlemah kemandirian ekonomi lokal jika tidak diantisipasi melalui perencanaan pembangunan yang adaptif.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Pondokmelati ke depan, agar selaras dengan visi pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kota Bekasi.

**2.2.2 Telaahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis yang sangat penting. Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi ke dalam bentuk arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Telaahan terhadap RPJMD ini disusun sebagai bagian dari proses perencanaan yang komprehensif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dan substansi perencanaan telah memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, terukur, dan berbasis pada data serta kondisi riil daerah. Melalui telaahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai isu strategis, potensi unggulan, serta tantangan yang dihadapi Kota Bekasi, guna menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



2.2.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pondokmelati

Dari sisi tantangan, pelayanan Kecamatan Pondokmelati dihadapkan pada karakter wilayah perbatasan dengan DKI Jakarta yang memicu mobilitas penduduk tinggi, arus kepentingan lintas-batas, dan kompleksitas koordinasi kelembagaan. Keterbatasan akses transportasi massal (belum terhubung commuter line) berdampak pada keterjangkauan warga terhadap layanan tatap muka, sekaligus menuntut penjadwalan dan pemerataan layanan yang lebih cermat hingga tingkat kelurahan/RT-RW. Di sisi internal, masih ditemukan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM frontliner, standarisasi SOP lintas loket, pemutakhiran data dasar kependudukan secara berkala, serta perbaikan sistem pengelolaan pengaduan yang responsif dan terintegrasi. Keterbatasan ruang publik dan tekanan terhadap lingkungan organisasi (drainase, sampah, RTH) juga menambah beban layanan, sementara disiplin anggaran menuntut prioritas program yang benar-benar bernilai manfaat dan mengukur hasilnya.

Di sisi peluang, kedekatan geografis dengan Jakarta membuka kesempatan kolaborasi layanan lintas-batas (diseminasi informasi, referensi layanan, dan kemitraan CSR) serta pengembangan ekosistem UMKM-jasa berbasis organisasi yang dapat ditopang oleh kemudahan perizinan dan pendampingan usaha. Digitalisasi menjadi pengungkit utama—melalui perluasan kanal layanan dare (formulir, antrean, konsultasi), integrasi aplikasi kota/kelurahan, dan pemanfaatan dashboard kinerja real-time untuk menyatukan waktu layanan, cakupan, kepuasan, serta penyelesaian aduan. Inovasi jemput-bola

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



(gerai keliling ke RW/sekolah/rumah ibadah), kemitraan komunitas (PKK, Karang Pelayanan Taruna, LPM), serta program edukasi literasi administrasi di lingkungan warga dapat memperpendek jarak layanan dan meningkatkan kepatuhan dokumen kependudukan. Dengan tata kelola yang adaptif-inovatif, standardisasi SOP berbasis SPBE/SAKIP, dan pengarusutamaan kelompok rentan (disabilitas, lansia, ibu-anak), Kecamatan Pondokmelati berpeluang meningkatkan saling layanan secara merata meski tanpa dukungan kawasan industri/komersial besar maupun jaringan KRL.

2.2.5 Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati

Berdasarkan permasalahan, isu sesuai konteks dan dengan memperhatikan potensi daerah, maka rumusan isu strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi untuk 5 tahun ke depan adalah seperti pada gambar di bawah ini.

• **Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang prima dan responsive**

Masih ditemui kesenjangan dalam hal akses dan mutu pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan umum lainnya yang membutuhkan inovasi pelayanan berbasis digital serta pendekatan jemput bola.

• **Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul integrasi pelayanan**

Terdapat kebutuhan untuk memperkuat peran kecamatan dalam menjembatani kerja sama teknis antara OPD dan instansi vertikal dalam rangka menyinergikan layanan dasar kepada masyarakat.

• **Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah**

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pengawasan lingkungan, dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.

• **Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat kelurahan**

Masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



kelurahan dalam hal tata kelola administrasi, perencanaan partisipatif, serta pemanfaatan teknologi informasi.

• **Peningkatan ketahanan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis wilayah**

Terdapat kebutuhan untuk memperluas cakupan layanan kesehatan dasar, penguatan ketahanan keluarga, serta dukungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat.

Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Pondokmelati

| No | Potensi Daerah           | Permasalahan                                                                                           | Isu KLHS                                                                                                                 | Global                        | Nasional          | Regional                    | Isu Strategis                                              |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelayanan administrasi   | Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang prima dan responsif                           | Akses layanan dasar                                                                                                      | Dampak Perubahan Iklim Global | Krisis Lingkungan | Layanan Infrastruktur Dasar | Integrasi Wilayah Regional dan Penataan Kota Berkelanjutan |
| 2  | Koordinasi lintas sektor | Penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul integrasi pelayanan | Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).              |                               |                   |                             |                                                            |
| 3  | Partisipasi masyarakat   | Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah                             | Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9); |                               |                   |                             |                                                            |
| 4  | SDM aparatur             | Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan di tingkat kelurahan                                  | Inklusivitas pembangunan                                                                                                 |                               |                   |                             |                                                            |
| 5  | Layanan kesehatan dasar  | Peningkatan ketahanan sosial dan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis wilayah                       | Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk usia (TPB 3)                               |                               |                   |                             |                                                            |

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3 .1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, serta RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030 merupakan dokumen perencanaan nasional yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga serta Rencana Pembangunan Daerah. OPD Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah berkewajiban menjabarkan arah kebijakan nasional ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. RPJMN 2025-2030 mengusung Visi “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Telaahan terhadap tujuan dan sasaran nasional yang relevan untuk Kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1 Telaahan RPJMN 2025-2030 untuk OPD Kecamatan

| Fokus Utama<br>RPJMN 2025-2030 | Relevansi Untuk<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                  | Dukungan OPD<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transisi Energi dan Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.</li><li>• Edukasi lingkungan hidup di tingkat lokal.</li></ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Program bank sampah, kompos, dan kampung hijau.</li><li>• Sosialisasi dan edukasi lingkungan ke sekolah dan kelompok masyarakat</li></ul>                                                                                          |
| Transformasi sosial            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan angka kemiskinan ekstrem</li><li>• Akses pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.</li><li>• Penguatan layanan pemberdayaan masyarakat dan keluarga.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi program bantuan sosial.</li><li>• Pelayanan administrasi kependudukan tingkat kelurahan.</li><li>• Koordinasi posyandu dan posbindu</li><li>• Kegiatan pemberdayaan RT/RW, PKK, dan Karang Taruna.</li></ul>            |
| Transformasi Ekonomi           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewilayahan</li><li>• Pengembangan UMKM lokal dan ekonomi digital mikro.</li></ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan UMKM melalui forum kewirausahaan kecamatan</li><li>• Promosi produk lokal dan pasar murah.</li><li>• Kolaborasi dengan dinas teknis untuk pelatihan dan pendampingan usaha.</li></ul>                                    |
| Transformasi Tata Kelola       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan kapasitas dan reformasi birokrasi kecamatan.</li><li>• Digitalisasi layanan publik.</li></ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi e-office, pelaporan digital, dan pelayanan terpadu</li><li>• Penyederhanaan SOP dan pelayanan yang berbasis pada kepuasan warga.</li><li>• Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan.</li></ul>                        |
| Pembangunan Wilayah            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggulangan daerah kumuh.</li><li>• Infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, penerangan).</li><li>• Tata kelola ruang dan pengurangan risiko bencana.</li></ul>                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemetaan wilayah rawan bencana, banjir, dan kawasan kumuh.</li><li>• Koordinasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis padat karya.</li><li>• Fasilitasi musrenbang kelurahan berbasis spasial dan kebutuhan nyata.</li></ul> |

Sumber data: Bapelitbangda Kota Bekasi, 2025

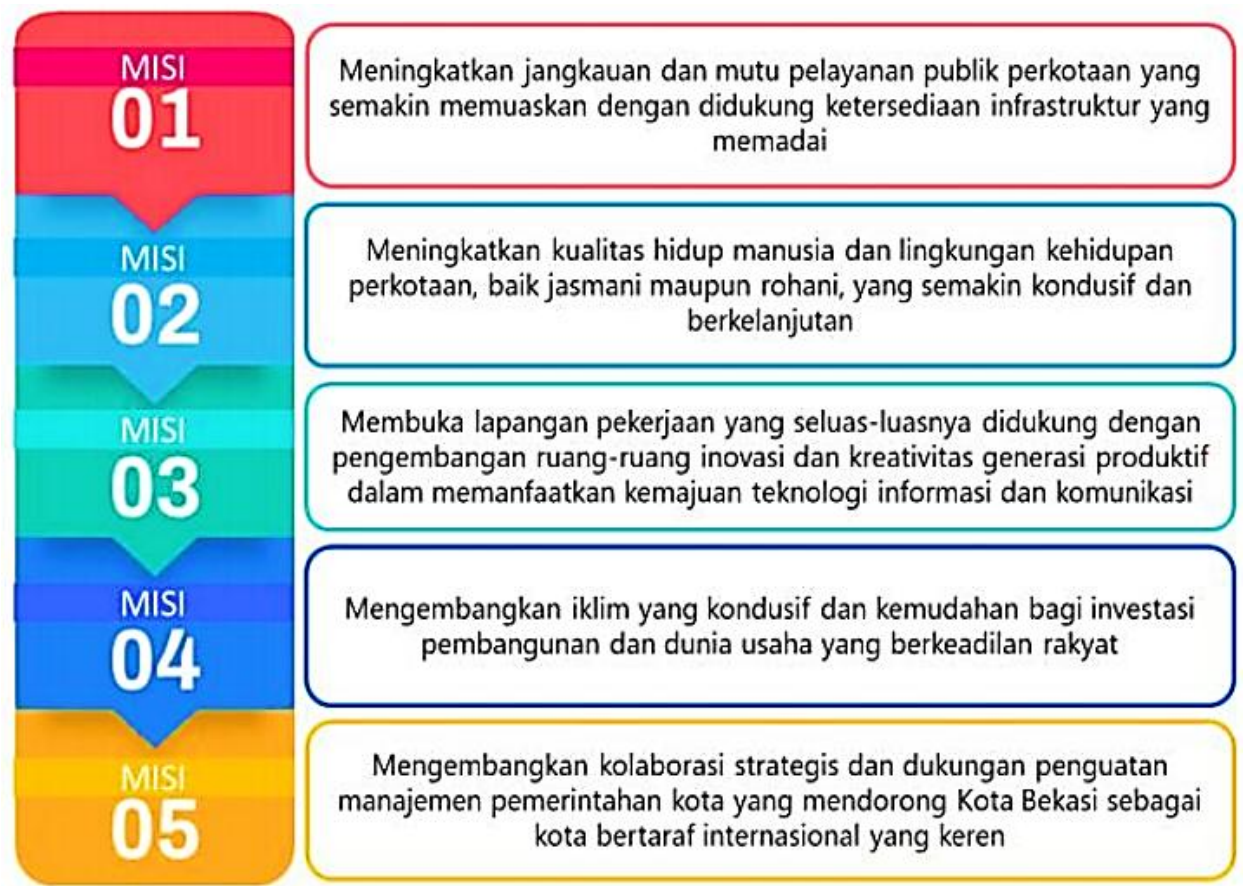
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 telah disusun sebagai landasan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. Mengusung visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata, RPJMD ini mencakup 25 Program Prioritas yang didukung 9 Langkah Strategis untuk menjawab

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



tantangan pembangunan secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah turut mendukung pencaipan Jabar Isimewa ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 juga telah disusun sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi dalam lima tahun kedepan dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025- 2045, RPJPD Provinsi Jabar Tahun 2025-2045, serta RPJPN Tahun 2025-2045. Dengan mengusung Visi “ Kota Bekasi Nyaman dan Sejahtera”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Ke-5 (lima) misi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
- 2) Misi kedua berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.
- 3) Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi. serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

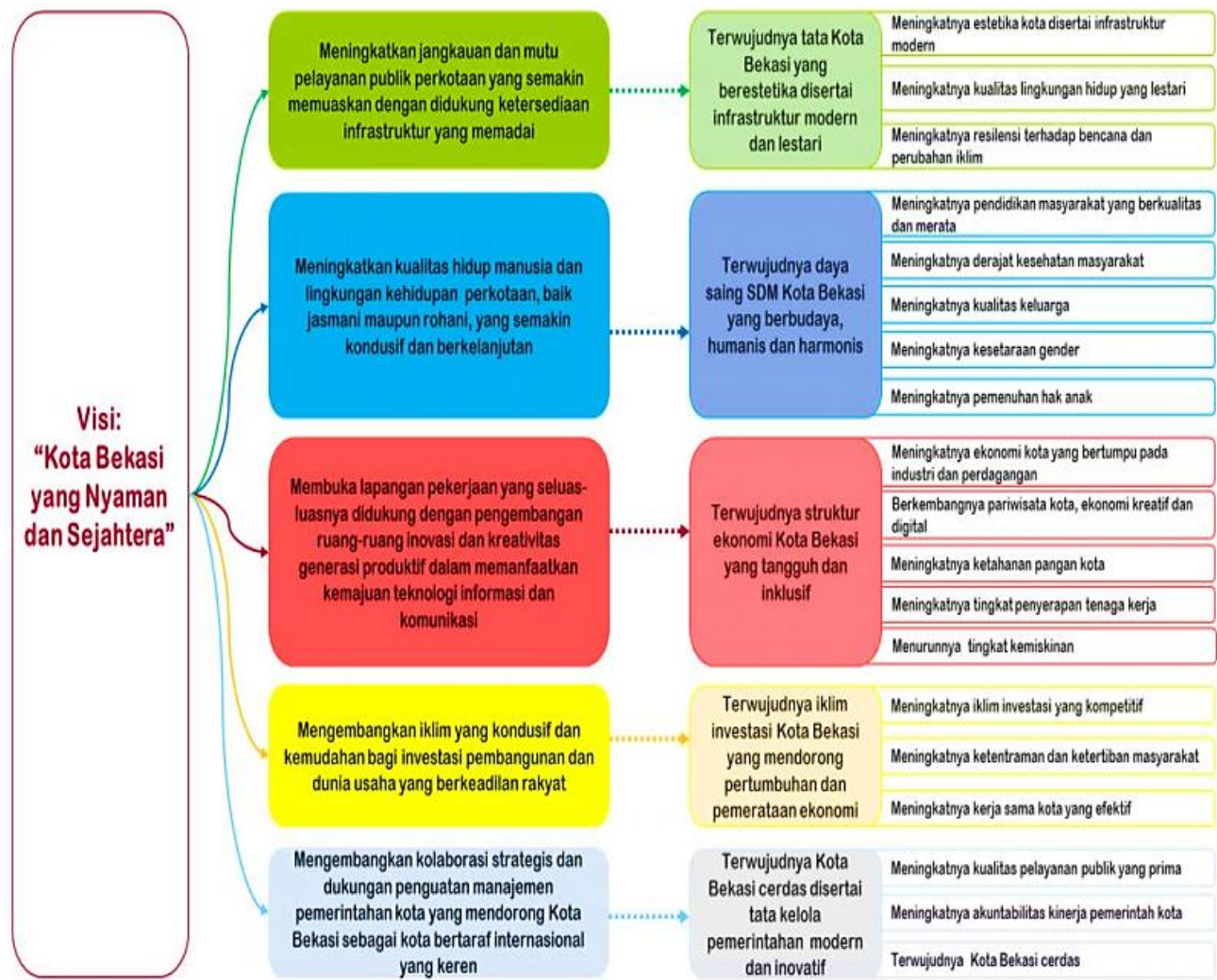


kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

- 4) Misi keempat berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya Tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.
- 5) Misi kelima berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

Visi dan misi tersebut akan dicapai melalui tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi 2025-2029



Sumber data: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



1. **Misi ke-1, yaitu “Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai”**
2. **Misi ke-5 “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”**

Selanjutnya untuk mencapai kondisi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja sebagai tahapan penting yang ditargetkan dicapai per tahun. Penentuan sasaran strategis Kecamatan Pondokmelati didasarkan pada faktor penentu keberhasilan yang diidentifikasi sebagai kunci penyelesaian isu strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pondokmelati memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati;  
Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Sedangkan Sasaran Kecamatan Pondokmelati yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati.  
Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran : Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik.
2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran : Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati;

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pondokmelati**

| Tujuan                                                                                                                          | Sasaran                                                                                 | IKU                                                                  | Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                | Base Line Tahun 2024 | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- |       |       |       |       |       | Sumber Data                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 2025                                           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                 |
| 1.1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati |                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik                 | IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden | 84,94                | 85                                             | 85,20 | 85,40 | 85,70 | 86,00 | 86,35 | Hasil Survey dan Pelaporan      |
|                                                                                                                                 | 1.1.1. Meningkatnya LKM Aktif yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati | Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik                 | Persentase LKM Aktif = $\frac{\text{(Jumlah LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik)}}{\text{(Jumlah Total LKM)}} \times 100\%$                                                                                                                        | 65%                  | 65%                                            | 67%   | 69%   | 71%   | 73%   | 75%   | Hasil Perhitungan dan Pelaporan |
|                                                                                                                                 | 1.2 2. Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati  | Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati | Nilai IKM tahun N - Nilai IKM tahun (N-)/Nilai IKM tahun (n-1) x 100 %                                                                                                                                                                                   | n/a                  | 0,07                                           | 0,24  | 0,24  | 0,35  | 0,35  | 0,40  | Hasil Perhitungan dan Pelaporan |

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2025, diolah

|                       |
|-----------------------|
| Paraf Koordinasi      |
| Camat Pondokmelati    |
| Kepala Bappeditbangda |
| Kabag Hukum           |



Penjelasan Tabel diatas adalah :

- 1.1 Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati, Pencapaian IKU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Pasal 6 ayat 1 diukur berdasarkan tingkat partisipasi aktif Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), seperti RT, RW, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Posyandu dan LPM. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Dukungan ini dapat berupa partisipasi dalam perencanaan pembangunan (Musrenbang), implementasi program (seperti posyandu, bank sampah, keamanan lingkungan), maupun dalam melakukan pengawasan sosial. Target kenaikan sebesar 2% (dua persen) per tahun mencerminkan pendekatan yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Target ini mempertimbangkan kondisi eksisting dimana tidak semua LKM memiliki kapasitas dan kemauan yang sama untuk terlibat secara aktif. Pendekatan bertahap memungkinkan Pemerintah Kecamatan untuk fokus pada penguatan kualitas LKM yang telah aktif sambil secara paralel melakukan identifikasi, pendampingan, dan motivasi terhadap LKM yang belum aktif, sehingga keberhasilan yang dicapai dapat bersifat solid dan berkelanjutan (*sustainable*). Dengan mencapai target ini, diharapkan terjadi penguatan ekosistem kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya akan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pondokmelati.
- 1.2 Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati, Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, target persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pondokmelati dari tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan perkembangan yang dinamis dan penuh optimisme. Berikut adalah narasi yang menggambarkan makna dari setiap angka target tersebut: Pada tahun 2025, target peningkatan IKM ditetapkan sebesar 0,07%. Angka ini mencerminkan fase awal transisi dan konsolidasi dari baseline tahun 2024. Peningkatan yang sangat kecil ini menunjukkan pendekatan yang hati-hati dan realistis, di mana upaya perbaikan

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



pelayanan publik baru mulai dilakukan secara sistematis. Target ini menjadi fondasi yang kokoh untuk percepatan peningkatan di tahun-tahun berikutnya, sekaligus menjadi indikator bahwa langkah pertama menuju perbaikan telah berhasil diraih. Memasuki tahun 2026 dan 2027, target peningkatan mengalami lompatan signifikan menjadi sekitar 0,23%. Kedua angka ini (0,24% dan 0,24%) menunjukkan bahwa strategi perbaikan pelayanan mulai menunjukkan hasil. Momentum peningkatan telah terbangun dengan stabil, menandakan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan di tahun sebelumnya mulai beradaptasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Konsistensi angka di kedua tahun ini juga mengindikasikan adanya komitmen yang berkelanjutan tanpa adanya fluktuasi yang berarti. Pada tahun 2028 dan 2029, target peningkatan kembali melonjak hingga menyentuh kisaran 0,35%. Ini adalah bukti bahwa akselerasi perbaikan pelayanan publik sedang berjalan dengan optimal. Berbagai inovasi, seperti digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai memberikan dampak yang lebih konkret. Stabilitas angka di kedua tahun ini (hanya selisih 0,0014%) menunjukkan bahwa laju peningkatan telah memasuki fase matang dan terencana dengan baik. Tahun 2030 menjadi puncak dari seluruh perjalanan peningkatan IKM, dengan target peningkatan tertinggi sebesar 0,40%. Angka ini bukan hanya sekadar kenaikan, tetapi merupakan penanda keberhasilan kumulatif dari seluruh upaya yang telah dilakukan selama enam tahun. Target ini mencerminkan keyakinan bahwa semua langkah perbaikan—mulai dari yang paling dasar hingga inovasi terkini—telah terintegrasi dan memberikan dampak maksimal terhadap kepuasan masyarakat. Pencapaian ini juga menjadi dasar yang kuat untuk menetapkan target yang lebih ambisius di periode berikutnya. Dari narasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa target persentase peningkatan IKM Kecamatan Pondokmelati dari tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan sangat terukur dan progresif.

**3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd Tahun 2025-2029**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



tindakan jangka menengah yang bersifat komprehensif dan sistematis. Strategi ini disusun untuk menjawab tantangan internal dan eksternal melalui langkah-langkah strategis yang mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan pelaksanaan, penajaman fokus sasaran, serta perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Dalam konteks ini, strategi bukan hanya menjadi pedoman teknis, melainkan juga alat pengarah untuk memastikan bahwa organisasi mampu bergerak secara terstruktur, terukur, dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penyusunan strategi ini memperhatikan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika sosial masyarakat, serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik.

Secara diagnostik, strategi ini muncul dari refleksi atas berbagai keterbatasan pada periode sebelumnya, seperti belum optimalnya sinergi antarunit kerja, lemahnya budaya kinerja berbasis hasil, serta kurangnya respons adaptif terhadap perubahan. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, strategi ini menjadi sarana koreksi dan perbaikan menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja ke depan.

Sebagai tindak lanjut dari strategi ini, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja. Selain itu, kebijakan diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan peningkatan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Fokus lainnya adalah pada efisiensi penggunaan anggaran melalui prioritas program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta adaptasi terhadap kebijakan pusat dan dinamika lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dalam Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi

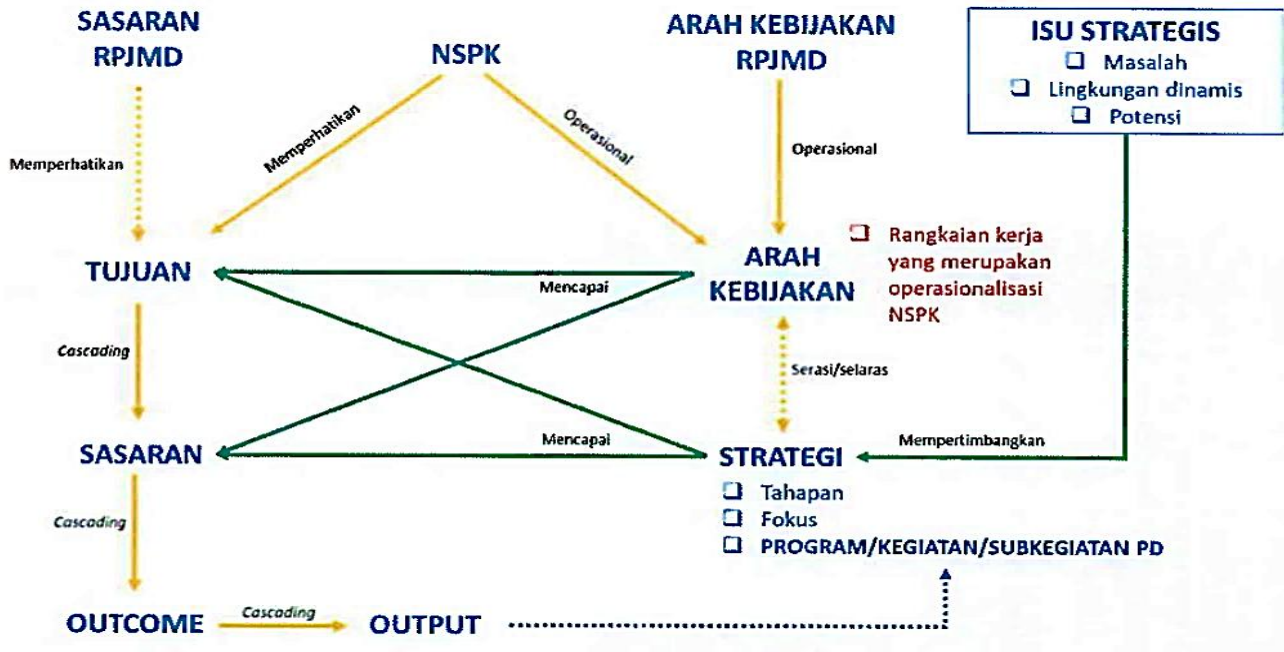
| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

Rancangan Awal  
Rencana Strategis  
Kecamatan Pondondokmelati Tahun 2025-2029

yang tanggap, lincah, dan berorientasi pada hasil dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

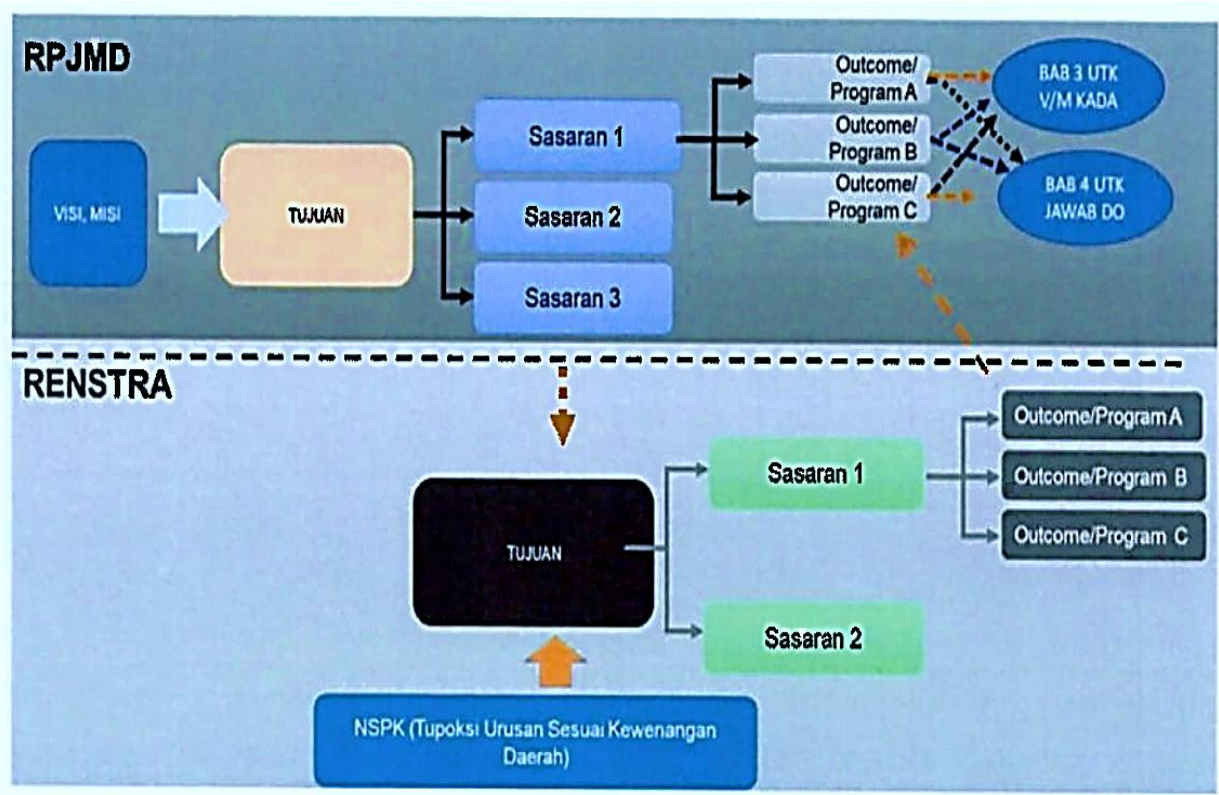


Gambar 3.2 Konsep Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

Gambar 3.3 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, diolah

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

| tahap 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tahap 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tahap 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tahap 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tahap 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fokus melakukan pendataan komprehensif terhadap seluruh LKM yang ada di wilayah Kecamatan Pondokmelati. Kami akan memetakan tidak hanya jumlah dan sebarannya, tetapi juga kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, peran yang selama ini dijalankan, serta kendala yang dihadapi masing-masing LKM. Melalui pendekatan partisipatif, kami akan mendengarkan secara langsung kebutuhan dan aspirasi mereka. Hasil dari tahap ini adalah sebuah database yang hidup dan sebuah peta jalan penguatan LKM yang tepat sasaran, disusun berdasarkan potensi dan realitas yang ada. | peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pengurus LKM. Program pelatihan yang aplikatif dan sesuai kebutuhan akan dilaksanakan, mencakup manajemen organisasi, administrasi keuangan sederhana, perencanaan program, dan teknik komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri dan kapabilitas pengurus dalam mengelola organisasinya secara lebih profesional dan transparan, sehingga LKM memiliki pondasi internal yang kuat sebelum diperankan lebih luas. | LKM yang telah memiliki kapasitas dasar kemudian secara aktif diintegrasikan ke dalam ekosistem pelayanan publik. Pada tahap ini, kami membangun jalur komunikasi dan kolaborasi yang formal dan berkelanjutan antara LKM dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. LKM mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang), menjadi mediator dalam penyampaian aspirasi masyarakat, dan berperan sebagai penyambung lidah dalam sosialisasi kebijakan pelayanan. Sinergi ini menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat legitimasi LKM di mata masyarakat. | Memasuki era digital, tahap ini mendorong LKM untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi. Pengurus LKM akan dibekali dengan literasi digital untuk mendukung fungsi mereka. Mereka dapat dilatih untuk menggunakan platform sederhana untuk pendataan warga, membantu masyarakat mengakses pelayanan online, atau memanfaatkan media sosial untuk komunikasi yang lebih efektif. | Tahap puncak dari perjalanan ini adalah memastikan kemandirian dan keberlanjutan peran LKM. Fokusnya bergeser dari pendampingan intensif kepada pendampingan yang bersifat fasilitatif. LKM didorong untuk mampu merancang program, mencari sumber pendanaan yang kreatif, dan mengevaluasi kinerjanya sendiri. Kami akan mendokumentasikan praktik-praktik terbaik dan model LKM yang berhasil untuk menjadi contoh dan direplikasi. |
| Fokus pada penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk layanan dasar di seluruh unit pelayanan, menjamin konsistensi dan kejelasan proses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menyederhanakan birokrasi, memangkas rantai prosedur yang berbelit, dan mengintegrasikan layanan yang terpisah untuk mengurangi waktu dan biaya bagi masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pelatihan kompetensi teknis dan soft skills bagi pelayan publik, dengan penekanan pada komunikasi, etika pelayanan, dan penyelesaian keluhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mengembangkan platform layanan digital seperti aplikasi pelaporan online, sistem antrean elektronik, dan informasi terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi.                                                                                                                                                                                                 | Memantau kepuasan masyarakat melalui survei IKM, mereview kinerja layanan, dan mengembangkan model inovasi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan terkini.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sumber : kertas kerja perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

Strategi Terintegrasi: Memperkuat LKM untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai fondasi awal, Tahap 1 difokuskan pada Pemetaan Komprehensif. Kami melakukan pendataan mendalam terhadap seluruh Lembaga Kemasyarakatan (LKM) di Kecamatan Pondokmelati untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan peran mereka. Secara paralel, kami menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh unit pelayanan guna menciptakan dasar kerja yang konsisten dan jelas.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Dengan peta yang jelas, Tahap 2 berfokus pada Penguatan Kapasitas. Pengurus LKM dibekali pelatihan teknis dan manajerial—seperti administrasi keuangan dan perencanaan program—untuk membangun pondasi internal yang kuat. Bersamaan dengan itu, aparat pelayanan publik juga ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan soft skills, etika pelayanan, dan penyelesaian keluhan, sehingga kedua belah pihak siap berkolaborasi.

Tahap 3 adalah tahap Integrasi dan Sinergi. LKM yang telah berkemampuan diajak berkolaborasi secara formal dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Mereka dilibatkan dalam Musrenbang dan menjadi mediator aspirasi masyarakat. Pada sisi birokrasi, prosedur yang berbelit dipangkas dan layanan yang terpisah diintegrasikan untuk mempermudah akses masyarakat, dimana LKM dapat berperan sebagai penyambung informasi.

Memasuki Tahap 4, kami melakukan Akselerasi Digital. LKM didorong untuk memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan platform digital untuk pendataan dan membantu masyarakat mengakses layanan online. Hal ini sejalan dengan pengembangan platform digital resmi oleh pemerintah, seperti aplikasi pelaporan online dan sistem antrian elektronik, untuk menciptakan transparansi dan efisiensi.

Akhirnya, Tahap 5 menitikberatkan pada Keberlanjutan dan Inovasi. Fokusnya adalah memastikan kemandirian LKM dalam mengelola program dan pendanaan, didukung oleh pendampingan fasilitatif. Sementara itu, pemerintah terus memantau kepuasan masyarakat melalui survei, mengevaluasi kinerja layanan, dan mengembangkan inovasi yang responsif. Dengan ini, tercipta sebuah ekosistem dimana LKM yang mandiri dan pemerintah yang inovatif bersama-sama menjaga kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



**Tabel 3.4 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Pd**

| Tujuan                                                                                                                     | Sasaran                                                                         | Strategi                                                                                                                                                                                         | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                              |
| Terwujudnya kota estetika disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati | Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberdayaan LKM melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kegiatan</li><li>• Meningkatkan kolaborasi antara LKM dan aparatur kecamatan.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan kapasitas dan insentif untuk LKM</li><li>• Kegiatan kemitraan strategis antara pemerintah dan LKM dalam pelayanan masyarakat</li></ul>                                     |
|                                                                                                                            | Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pondokmelati | <ul style="list-style-type: none"><li>• Digitalisasi layanan publik dan simplifikasi prosedur pelayanan</li><li>• Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi sistem layanan terpadu berbasis digital</li><li>• Evaluasi dan penyederhanaan SOP pelayanan publik</li><li>• Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berkala</li></ul> |

Sumber : Dokemen perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan merupakan hasil dari proses cascading atau penjabaran yang sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan output organisasi perangkat daerah. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, pendekatan ini memastikan adanya keterkaitan logis antara visi dan misi Kepala Daerah dengan implementasi teknis di tingkat pelaksana.

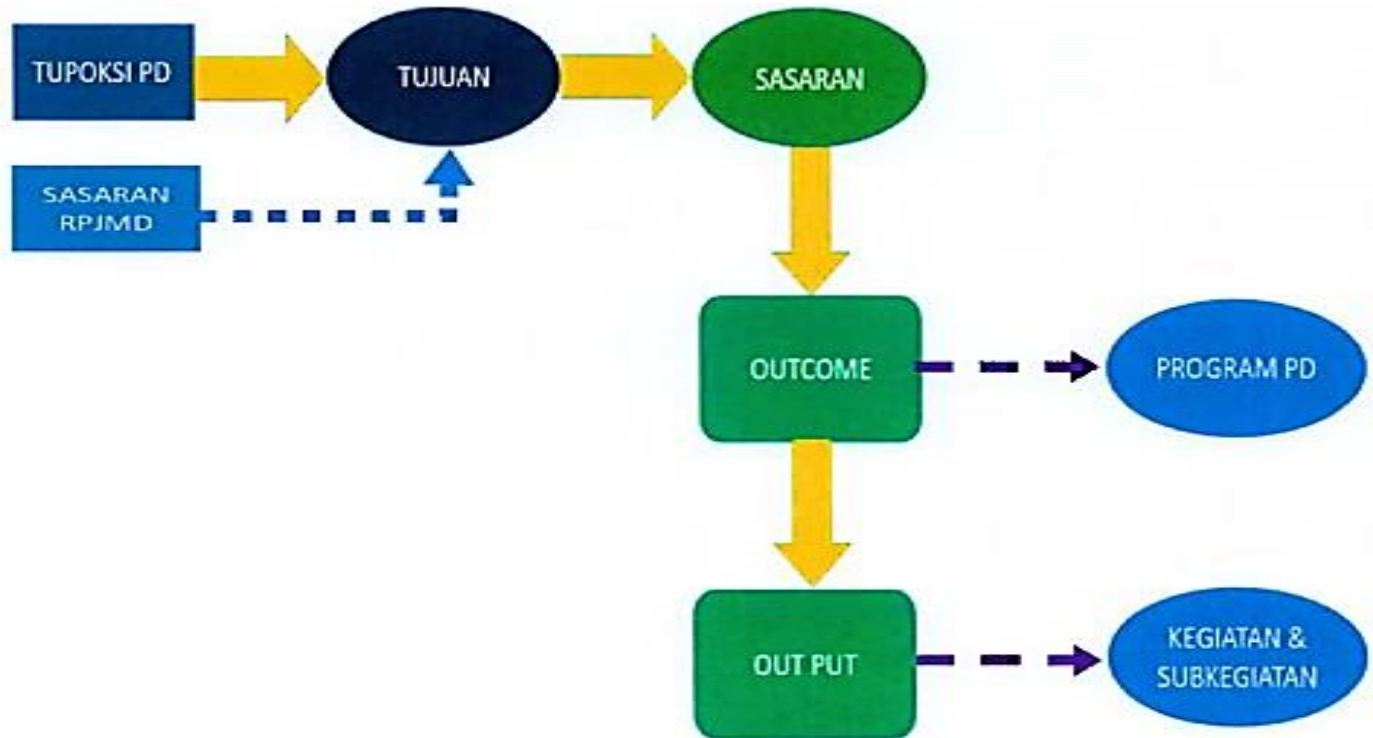
Penjabaran ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan yang dirancang mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan demikian, setiap program tidak hanya sekadar daftar kegiatan, tetapi mengandung nilai strategis yang mendukung capaian sasaran kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.

Rencana strategis juga disusun dengan mempertimbangkan sinkronisasi vertikal dan horizontal, baik dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi (RPJMN, RKP, RPJMD Provinsi), maupun antar-perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergi antarkebijakan demi pencapaian pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara berkelanjutan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara konsisten. Tahun 2030 diposisikan sebagai bagian dari kesinambungan strategi pembangunan, sehingga penting ditegaskan bahwa program pada tahun tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan menjaga arah kebijakan tetap selaras dengan

| Paraf Koordinasi      |  |
|-----------------------|--|
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan.

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Pondokmelati**



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Tabel 4.2 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

| SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                               | TUJUAN<br>RENSTRA OPD                                                                                                      | SASARAN                                                                    | OUTCOME                                          | Output | INDIKATOR                                            | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERANGKAT<br>DAERAH    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4                                                           | 7                                                                                                                          | 9                                                                          | 11                                               |        | 12                                                   | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                     |
|                                                             | Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern dan kualitas pelayanan publik yang prima di Kecamatan Pondokmelati |                                                                            |                                                  |        | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 1. Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern |                                                                                                                            | Meningkatnya LKM yang Mendukung Pelayanan Publik di Kecamatan Pondokmelati |                                                  |        | Persentase LKM yang Aktif                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|                                                             |                                                                                                                            |                                                                            | Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik |        | Persentase LKM yang Aktif                            | <b>1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b><br><b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b><br>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan<br>Evaluasi Kelurahan<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna)<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimelati)<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimurni)<br>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)<br>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna) | Kecamatan Pondokmelati |

|           |           |                      |                  |
|-----------|-----------|----------------------|------------------|
|           |           |                      | Paraf Koordinasi |
|           | Camat Poi | Camat Pondokmelati   |                  |
| Kabag Ba  | Kepala Ba | Kepala Bappelibangda |                  |
| Kabag Hul |           | Kabag Hukum          |                  |



| SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN                                    | TUJUAN<br>RENSTRA OPD | SASARAN                                                                                         | OUTCOME                                                                           | Output | INDIKATOR                                                                        | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                                | PERANGKAT<br>DAERAH       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2. Meningkatnya<br>kualitas<br>pelayanan<br>publik yang<br>prima |                       | Meningkatnya<br>kualitas<br>pelayanan<br>publik yang<br>prima pada<br>Kecamatan<br>Pondokmelati |                                                                                   |        |                                                                                  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>(Kelurahan Jatimelati)                                                                                                                  |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>(Kelurahan Jatimurni)                                                                                                                   |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan<br/>Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                                |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan<br>(Kelurahan Jatirahayu)                                                                                                                |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan<br>(Kelurahan Jatiwarna)                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan<br>(Kelurahan Jatimelati)                                                                                                                |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan<br>(Kelurahan Jatimurni)                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)                                                                                                    |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat (Kelurahan Jatirahayu)                                                                                                      |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat (Kelurahan Jatiwarna)                                                                                                       |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat (Kelurahan Jatimelati)                                                                                                      |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat (Kelurahan Jatimurni)                                                                                                       |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 | Meningkatnya<br>efektivitas<br>pelayanan<br>masyarakat di<br>wilayah<br>kecamatan |        | Persentase<br>Peningkatan Kepuasan<br>Masyarakat di<br>Kecamatan<br>Pondokmelati |                                                                                                                                                                                 | Kecamatan<br>Pondokmelati |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat                                                    | <b>Program Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>                                                                                                            |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan<br/>yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                                                                        |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang<br>terkait dengan kewenangan lain yang<br>dilimpahkan                                                                                      |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan<br/>Sarana Pelayanan Umum</b>                                                                                                          |                           |
|                                                                  |                       |                                                                                                 |                                                                                   |        |                                                                                  | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat<br>Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang<br>Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan<br>Pondokmelati |                           |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappeditbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



|                       |
|-----------------------|
| Paraf Koordinasi      |
| Camat Pondokmelati    |
| Kepala Bappeditbangda |
| Kabag Hukum           |

| SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN<br>RENSTRA OPD | SASARAN | OUTCOME | Output | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                 | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |                       |         |         |        |           | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirahayu) |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwarna)  |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimlati)  |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimurni)  |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                                     |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                         |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan                                    |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)                                                                            |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>                                                                                                              |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan</b>                                                                                                  |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                         |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                                             |                     |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                |                     |



|                       |
|-----------------------|
| Paraf Koordinasi      |
| Camat Pondokmelati    |
| Kepala Bappeditbangda |
| Kabag Hukum           |
|                       |
|                       |

| SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN<br>RENSTRA OPD | SASARAN | OUTCOME                                                                                 | Output | INDIKATOR                                                                           | PROGRAM /KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PERANGKAT<br>DAERAH |
|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                               |                       |         | 1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran;           |        | Persentase Keselarasan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|                               |                       |         | 2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan                               |        | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan                                | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b><br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                               |                       |         | 3. Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah; |        | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b><br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|                               |                       |         | 4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel.                         |        | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel                           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b><br>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br><b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b><br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD<br><b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                     |



| SASARAN RPJMD<br>YANG RELEVAN | TUJUAN<br>RENSTRA OPD | SASARAN | OUTCOME | Output | INDIKATOR | PROGRAM/KEGIATAN/<br>SUBKEGIATAN                                                                                   | PERANGKAT<br>DAERAH |  |
|-------------------------------|-----------------------|---------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|                               |                       |         |         |        |           | Pengadaan Mebel                                                                                                    |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                     |  |
|                               |                       |         |         |        |           |                                                                                                                    |                     |  |

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappeditbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan                 | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                                                                                                                               | Baselin e 2024 | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |                   |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                | Ket |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----|
|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                | 2025                                      |                   | 2026      |                | 2027      |                | 2028      |                | 2029      |                | 2030      |                |     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                | Target                                    | Rp                | Target    | Rp             | Target    | Rp             | Target    | Rp             | Target    | Rp             | Target    | Rp             |     |
| 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4              | 5                                         | 6                 | 7         | 8              | 9         | 10             | 11        | 12             | 13        | 14             | 15        | 16             | 17  |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                          |                                                                                                                                                                        |                |                                           | 18.631.928.770,00 |           | 18.727.072.600 |           | 19.357.041.120 |           | 20.622.561.445 |           | 21.690.852.591 |           | 22.348.853.169 |     |
| Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran    | Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran                                                                                                | 100            | 100                                       | 1.000.000         | 100       | 2.000.000      | 100       | 10.000.000     | 100       | 10.000.000     | 100       | 5.000.000      | 100       | 10.000.000     |     |
| Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Terpenuhinya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 100%           | 100%                                      | 1.000.000         | 100%      | 2.000.000      | 100%      | 10.000.000     | 100%      | 10.000.000     | 100%      | 5.000.000      | 100%      | 10.000.000     |     |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | -              | -                                         | -                 | -         | -              | 1 Dokumen | 5.000.000      | 1 Dokumen | 5.000.000      | 1 Dokumen | 2.500.000      | 1 Dokumen | 5.000.000      |     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | 1 Laporan                                 | 1.000.000         | 1 Laporan | 2.000.000      | 1 Laporan | 5.000.000      | 1 Laporan | 5.000.000      | 1 Laporan | 2.500.000      | 1 Laporan | 5.000.000      |     |
| Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan                       | Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan                                                                                                                   | 95,35          | 95,35                                     | 12.473.060.000    | 95,44     | 15.716.532.000 | 95,53     | 15.723.532.000 | 95,62     | 17.523.532.000 | 95,71     | 19.523.532.000 | 95,71     | 21.323.532.000 |     |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Terselenggaranya layanan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 100%           | 100%                                      | 12.473.060.000    | 100%      | 15.716.532.000 | 100%      | 15.723.532.000 | 100%      | 17.523.532.000 | 100%      | 19.523.532.000 | 100%      | 21.323.532.000 |     |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | OB             | 1188 OB                                   | 12.470.060.000    | 3321 OB   | 15.713.532.000 | 3321 OB   | 15.713.532.000 | 3321 OB   | 17.513.532.000 | 3321 OB   | 19.513.532.000 | 3321 OB   | 21.313.532.000 |     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | 1 Laporan                                 | 3.000.000,00      | 1 Laporan | 3.000.000      | 1 Laporan | 5.000.000      | 1 Laporan | 5.000.000      | 1 Laporan | 5.000.000      | 1 Laporan | 5.000.000      |     |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                   | -              | -                                         | -                 | -         | -              | 2 Laporan | 5.000.000      | 2 Laporan | 5.000.000      | 2 Laporan | 5.000.000      | 2 Laporan | 5.000.000      |     |

Paraf Koordinasi  
Camat Pondokmelati  
Kepala Bapelitbangda  
Kabag Hukum



| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                                            | Baselin e 2024 | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |               |         |               |           |               |           |               |           |               |           |               | Ket |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----|
|                                                                                              |                                                                                     |                | 2025                                      |               | 2026    |               | 2027      |               | 2028      |               | 2029      |               | 2030      |               |     |
|                                                                                              |                                                                                     |                | Target                                    | Rp            | Target  | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            | Target    | Rp            |     |
| Outcome: Meningkatnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah              | 84,10          | 84,10                                     | 37.000.000    | 84,18   | 0             | 84,18     | 262.500.000   | 84,32     | 302.500.000   | 84,42     | 352..500.000  | 84,42     | 352.500.000   |     |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                    | Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | %              | 100%                                      | 37.000.000    | -       | -             | 100%      | 260.000.000   | 100%      | 300.000.000   | 100%      | 350.000.000   | 100%      | 350.000.000   |     |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Disediakan           | -              | -                                         | -             | -       | -             | 1 Paket   | 160.000.000   | 1 Paket   | 200.000.000   | 1 Paket   | 250.000.000   | 1 Paket   | 250.000.000   |     |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 10 Orang       | 5 Orang                                   | 37.000.000    | 5 Orang | 37.000.000    | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             |     |
| Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan                 | -              | -                                         | -             | -       | -             | 150 Orang | 100.000.000   | 140 Orang | 100.000.000   | 140 Orang | 100.000.000   | 140 Orang | 100.000.000   |     |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                       | Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah          | -              | -                                         | -             | -       | -             | 100%      | 2.500.000     | 100%      | 2.500.000     | 100%      | 2.500.000     | 100%      | 2.500.000     |     |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    | -              | -                                         | -             | -       | -             | 1 Laporan | 2.500.000     | 1 Laporan | 2.500.000     | 1 Laporan | 2.500.000     | 1 Laporan | 2.500.000     |     |
| Outcome: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel                         | Persentase Pengelolaan Barang Daerah yang Akuntabel                                 | 100            | 100                                       | 6.117.868.770 | 100%    | 6.889.386.820 | 100%      | 7.213.981.120 | 100%      | 7.223.981.120 | 100%      | 6.833.981.120 | 100%      | 6.653.981.120 |     |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                           | Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | %              | 100%                                      | 369.987.650   | 100%    | 457.780.000   | 100%      | 750.000.000   | 100%      | 910.000.000   | 100%      | 590.000.000   | 100%      | 610.000.000   |     |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | Paket          | 1 Paket                                   | 20.000.000    | 1 Paket | 15000.000     | 1 Paket   | 15.000.000    | 1 Paket   | 35.000.000    | 1 Paket   | 15.000.000    | 1 Paket   | 35.000.000    |     |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | -              | -                                         | -             | -       | -             | 1 Paket   | 150.000.000   | 1 Paket   | 450.000.000   | 1 Paket   | 150.000.000   | 1 Paket   | 150.000.000   |     |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | Paket          | 4 Paket                                   | 189.568.000   | 4 Paket | 210.000.000   | 4 Paket   | 250.000.000   | 4 Paket   | 200.000.000   | 4 Paket   | 200.000.000   | 4 Paket   | 200.000.000   |     |

Paraf Koordinasi  
Camat Pondokmelati  
Kepala Bappeditbangda  
Kabag Hukum



| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                              | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                                                               | Baselin e 2024 | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |               |            |               |            |               |            |               |             |               |             |               | Ket |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----|
|                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 2025                                      |               | 2026       |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029        |               | 2030        |               |     |
|                                                                                                                    |                                                                                                        |                | Target                                    | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target      | Rp            | Target      | Rp            |     |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | Paket          | 2 Paket                                   | 53.384.650    | 2 Paket    | 30.000.000    | 2 Paket    | 45.000.000    | 2 Paket    | 45.000.000    | 2 Paket     | 45.000.000    | 2 Paket     | 45.000.000    |     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | Dokume n       | 1 Dokumen                                 | 40.000.000    | 1 Dokume n | 50.000.000    | 1 Dokume n | 40.000.000    | 1 Dokume n | 40.000.000    | 1 Doku men  | 40.000.000    | 1 Doku men  | 40.000.000    |     |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Laporan        | 1 Laporan                                 | 67.035.000    | 1 Laporan  | 100.610.000   | 1 Laporan  | 150.000.000   | 1 Laporan  | 90.000.000    | 1 Lapora n  | 90.000.000    | 1 Laporan   | 90.000.000    |     |
| Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokume n     | -                                         | -             | 1 Dokume n | 50.000.000    | 1 Dokume n | 100.000.000   | 1 Dokume n | 50.000.000    | 1 Doku men  | 50.000.000    | 1 Doku men  | 50.000.000    |     |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia                       | 100%           | -                                         | -             | 100%       | 592.625.700   | 100%       | 420.000.000   | 100%       | 260.000.000   | 100%        | 200.000.000   | 100%        | 0             |     |
| Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | -              | -                                         | -             | 20 Unit    | 148.956.000   | 10 Unit    | 170.000.000   | 7 Unit     | 60.000.000    | -           |               | -           | -             |     |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disedikan                                                 | 10 Unit        | -                                         | -             | 30 Unit    | 443.669.700   | 25 Unit    | 250.000.000   | 25 Unit    | 200.000.000   | 20 Unit     | 200.000.000   | -           | -             |     |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  | 100%           | 100%                                      | 5.320.981.120 | 100%       | 5.323.981.120 | 100%       | 5.423.981.120 | 100%       | 5.423.981.120 | 100%        | 5.423.981.120 | 100%        | 5.423.981.120 |     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 12 Laporan                                | 200.000.000   | 12 Laporan | 200.000.000   | 12 Laporan | 300.000.000   | 12 Laporan | 300.000.000   | 12 Lapora n | 300.000.000   | 12 Lapor an | 300.000.000   |     |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 12 Laporan                                | 5.123.981.120 | 12 Laporan | 5.123.981.120 | 12 Laporan | 5.123.981.120 | 12 Laporan | 5.123.981.120 | 12 Lapora n | 5.123.981.120 | 12 Lapor an | 5.123.981.120 |     |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | terpeliharanya Barang Milik Daerah                                                                     | 100%           | 100%                                      | 426.900.000   | 100%       | 515.000.000   | 100%       | 620.000.000   | 100%       | 630.000.000   | 100%        | 620.000.000   | 100%        | 620.000.000   |     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 2 Unit                                    | 60.000.000    | 2 Unit     | 60.000.000    | 2 Unit     | 80.000.000    | 2 Unit     | 90.000.000    | 2 Unit      | 80.000.000    | 2 Unit      | 80.000.000    |     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 Unit        | 30 Unit                                   | 147.000.000   | 30 Unit    | 185.000.000   | 30 Unit    | 190.000.000   | 30 Unit    | 190.000.000   | 30 Unit     | 190.000.000   | 30 Unit     | 190.000.000   |     |



| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                                                                                                                           | Baselin e 2024 | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Ket                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                | 2025                                      |             | 2026       |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                        |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                | Target                                    | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          | Target     | Rp          |                        |
| Operasional atau Lapangan                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                |                                           |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |                        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                 | 30 Unit        | 30 Unit                                   | 35.000.000  | 30 Unit    | 70.000.000  | 30 Unit    | 100.000.000 | 30 Unit    | 100.000.000 | 30 Unit    | 100.000.000 | 30 Unit    | 100.000.000 |                        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                           | 7 Unit         | 3 Unit                                    | 184.900.000 | 3 Unit     | 200.000.000 | 3 Unit     | 250.000.000 | 3 Unit     | 250.000.000 | 4 Unit     | 250.000.000 | 3 Unit     | 250.000.000 |                        |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                                 | Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan                                                                                                            | %              | 100%                                      | 267.590.000 | 100%       | 260.000.000 | 100%       | 260.000.000 | 100%       | 260.000.000 | 100%       | 260.000.000 | 100%       | 260.000.000 |                        |
| Outcome : Meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan                                                              | Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan                                                                                                            |                | 100%                                      |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             |                        |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                             | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                             | 100%           | 100%                                      | 50.000.000  | 100%       | 30.000.000  | 100%       | 50.000.000  | 100%       | 50.000.000  | 100%       | 50.000.000  | 100%       | 50.000.000  |                        |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                        | 4 Laporan      | 4 Laporan                                 | 50.000.000  | 4 Laporan  | 30.000.000  | 4 Laporan  | 50.000.000  | 4 Laporan  | 50.000.000  | 4 Laporan  | 50.000.000  | 4 Laporan  | 50.000.000  |                        |
| Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                               | Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 100%           | 100%                                      | 217.590.000 | 100%       | 210.000.000 | 100%       | 350.000.000 | 100%       | 350.000.000 | 100%       | 260.000.000 | 100%       | 310.773.351 |                        |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum          | 12 Dokumen     | 12 Dokumen                                | 107.590.000 | 12 Dokumen | 50.000.000  | 12 Dokumen | 150.000.000 | 12 Dokumen | 150.000.000 | 12 Dokumen | 100.000.000 | 12 Dokumen | 150.773.351 | Kecamatan Pondokmelati |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum          | 12 Dokumen     | 12 Dokumen                                | 50.000.000  | 12 Dokumen | 40.000.000  | 12 Dokumen | 50.000.000  | 12 Dokumen | 50.000.000  | 12 Dokumen | 40.000.000  | 12 Dokumen | 40.000.000  | Kelurahan Jatirahayu   |



| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                                                                                                                 | Baselin e 2024         | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |                          |                | Ket                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                        | 2025                                      |                | 2026                      |                | 2027                      |                | 2028                      |                | 2029                      |                | 2030                     |                |                        |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                        | Target                                    | Rp             | Target                    | Rp             | Target                    | Rp             | Target                    | Rp             | Target                    | Rp             | Target                   | Rp             |                        |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum              | 12 Dokumen             | 12 Dokumen                                | 20.000.000     | 12 Dokumen                | 40.000.000     | 12 Dokumen                | 50.000.000     | 12 Dokumen                | 50.000.000     | 12 Dokumen                | 40.000.000     | 12 Dokumen               | 40.000.000     | Kelurahan Jatiwarna    |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait DalamPemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen             | 12 Dokumen                                | 20.000.000     | 12 Dokumen                | 40.000.000     | 12 Dokumen                | 50.000.000     | 12 Dokumen                | 50.000.000     | 12 Dokumen                | 40.000.000     | 12 Dokumen               | 40.000.000     | Kelurahan Jatimlati    |
| Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen             | 12 Dokumen                                | 20.000.000     | 12 Dokumen                | 40.000.000     | 12 Dokumen                | 50.000.000     | 12 Dokumen                | 50.000.000     | 12 Dokumen                | 40.000.000     | 12 Dokumen               | 40.000.000     | Kelurahan Jatimurni    |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                        | Persentase LKM yang aktif                                                                                                                                |                        | 100%                                      | 8.544.065.400  | 100%                      | 15.323.514.400 | 100%                      | 16.117.272.446 | 100%                      | 17.045.627.339 | 100%                      | 17.918.363.459 | 100%                     | 18.878.787.740 |                        |
| Outcome : Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik                                                                                |                                                                                                                                                          | 100%                   | 100%                                      |                | 100%                      |                | 100%                      |                | 100%                      |                | 100%                      |                | 100%                     |                |                        |
| Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan                                                                                                | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 100%                   | 100%                                      | 12.549.372.600 | 100%                      | 15.003.514.400 | 100%                      | 15.153.334.666 | 100%                      | 15.333.054.400 | 100%                      | 15.431.830.048 | 100%                     | 15.265.830.048 |                        |
| Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                            | Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan                 | 181.617.000    | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 125.000.000    | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 170.000.000    | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 300.000.000    | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 300.000.000    | 15Lembaga Kemasyarakatan | 150.000.000    | Kecamatan Pondokmelati |
| Evaluasi Kelurahan                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                  | 1 Laporan              | 1 Laporan                                 | 40.000.000     | 1 Laporan                 | 30.000.000     | 1 Laporan                 | 70.280.266     | 1 Laporan                 | 120.000.000    | 1 Laporan                 | 120.000.000    | 1 Laporan                | 120.000.000    | Kecamatan Pondokmelati |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                                                                                                     | 1 Unit                 | 1 Unit                                    | 200.000.000    | 1 Unit                    | 200.000.000    | 1 Unit                    | 200.000.000    | 1 Unit                    | 200.000.000    | 1 Unit                    | 200.000.000    | 1 Unit                   | 200.000.000    | Kelurahan Jatirahayu   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappeditbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



| Bidang Urusan<br>Pemerintahan Dan<br>Program/Outcome/<br>Kegiatan/Sub<br>Kegiatan | Indikator Program/ Kegiatan/<br>SubKegiatan                                    | Baselin<br>e<br>2024        | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |               |                              |               |                              |               |                              |               |                                    |               |                             |               | Ket                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
|                                                                                   |                                                                                |                             | 2025                                      |               | 2026                         |               | 2027                         |               | 2028                         |               | 2029                               |               | 2030                        |               |                        |
|                                                                                   |                                                                                |                             | Target                                    | Rp            | Target                       | Rp            | Target                       | Rp            | Target                       | Rp            | Target                             | Rp            | Target                      | Rp            |                        |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | 1 Unit                      | 1 Unit                                    | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                             | 200.000.000   | 1 Unit                      | 200.000.000   | Kelurahan Jatiwarna    |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | 1 Unit                      | 1 Unit                                    | 290.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                             | 200.000.000   | 1 Unit                      | 200.000.000   | Kelurahan Jatimlati    |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                           | 1 Unit                      | 1 Unit                                    | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                       | 200.000.000   | 1 Unit                             | 200.000.000   | 1 Unit                      | 200.000.000   | Kelurahan Jatimurni    |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 4 Pokmas/<br>Ormas          | 4 Pokmas/<br>Ormas                        | 220.000.000   | 4 Pokmas/<br>Ormas           | 171.460.000   | 4 Pokmas<br>/<br>Ormas       | 220.000.000   | 4 Pokmas/<br>Ormas           | 220.000.000   | 4 Pokmas<br>s/<br>Ormas            | 318.775.648   | 4 Pokmas/<br>Ormas          | 318.775.648   | Kecamatan Pondokmelati |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 306 Pokmas<br>/Ormas        | 306 Pokmas/<br>Ormas                      | 2.522.569.000 | 306 Pokmas/<br>Ormas         | 5.450.742.000 | 306 Pokmas<br>/<br>Ormas     | 5.452.742.000 | 306 Pokmas/<br>Ormas         | 5.452.742.000 | 306 Pokmas<br>s/<br>Ormas          | 5.452.742.000 | 306 Pokmas/<br>Ormas        | 5.450.742.000 | Kelurahan Jatirahayu   |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas                    | 7 Pokmas/<br>Ormas                        | 1.238.360.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas           | 2.579.821.800 | 7 Pokmas<br>/<br>Ormas       | 2.581.821.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas           | 2.581.821.800 | 7 Pokmas<br>s/<br>Ormas            | 2.581.821.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas          | 2.579.821.800 | Kelurahan Jatiwarna    |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas                    | 7 Pokmas/<br>Ormas                        | 1.481.740.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas           | 3.263.668.800 | 7 Pokmas<br>/<br>Ormas       | 3.269.668.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas           | 3.269.668.800 | 7 Pokmas<br>s/<br>Ormas            | 3.269.668.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas          | 3.263.668.800 | Kelurahan Jatimlati    |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 7 Pokmas                    | 7 Pokmas<br>/Ormas                        | 1.358.763.800 | 7 Pokmas<br>/Ormas           | 2.582.821.800 | 7 Pokmas<br>/Ormas           | 2.588.821.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas           | 2.588.821.800 | 7 Pokmas<br>s/<br>Ormas            | 2.588.821.800 | 7 Pokmas/<br>Ormas          | 2.582.821.800 | Kelurahan Jatimurni    |
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                             | Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan         | %                           | 100%                                      | 320.000.000   | 100%                         | 320.000.000   | 100%                         | 500.000.000   | 100%                         | 600.000.000   | 100%                               | 600.000.000   | 100%                        | 600.000.000   |                        |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan                            | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan | 2 Lembaga Kemasyarak<br>atan              | 40.000.000    | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan  | 40.000.000    | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan  | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasyarak<br>atan  | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasyar<br>arakata<br>n  | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasya<br>rakatan | 50.000.000    | Kelurahan Jatirahayu   |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan                            | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan | 2 Lembaga Kemasyarak<br>atan              | 40.000.000    | 2 Lembaga Kemasyar<br>akatan | 40.000.000    | 2 Lembaga Kemasyar<br>akatan | 50.000.000    | 2 Lembaga Kemasyarak<br>atan | 50.000.000    | 2 Lembaga Kemasyar<br>arakata<br>n | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasya<br>rakatan | 50.000.000    | Kelurahan Jatiwarna    |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan                            | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan | 2Lembaga Kemasyarak<br>atan               | 40.000.000    | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan  | 40.000.000    | 2Lembaga Kemasyar<br>akatan  | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasyarak<br>atan  | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasya<br>arakata<br>n   | 50.000.000    | 2Lembaga Kemasya<br>rakatan | 50.000.000    | Kelurahan Jatimlati    |

Paraf Koordinasi  
Camat Pondokmelati  
Kepala Bappedilbangda  
Kabag Hukum



| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan      | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                        | Baselin e 2024           | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |             |                          |             |                          |             |                          |             |                            |             |                           |             | Ket                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                            |                                                                 |                          | 2025                                      |             | 2026                     |             | 2027                     |             | 2028                     |             | 2029                       |             | 2030                      |             |                         |
|                                                                            |                                                                 |                          | Target                                    | Rp          | Target                   | Rp          | Target                   | Rp          | Target                   | Rp          | Target                     | Rp          | Target                    | Rp          |                         |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan             | 2Lembaga Kemasyar akatan | 2Lembaga Kemasyarak atan                  | 40.000.000  | 2Lembaga Kemasyar akatan | 40.000.000  | 2Lembaga Kemasyar akatan | 50.000.000  | 2Lembaga Kemasyarak atan | 50.000.000  | 2Lemba ga Kemasy arakata n | 50.000.000  | 2Lembag a Kemasya rakatan | 50.000.000  | Kelurahan Jatimurni     |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan                | 1 Laporan                                 | 80.000.000  | 1 Laporan                | 60.000.000  | 1 Laporan                | 100.000.000 | 1 Laporan                | 200.000.000 | 1 Lapora n                 | 200.000.000 | 1 Lapor an                | 200.000.000 | Kecamatan Pondokmel ati |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan                | 1 Laporan                                 | 20.000.000  | 1 Laporan                | 25.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Lapora n                 | 50.000.000  | 1 Lapor an                | 50.000.000  | Kelurahan Jatirahayu    |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan                | 1 Laporan                                 | 20.000.000  | 1 Laporan                | 25.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Lapora n                 | 50.000.000  | 1 Lapor an                | 50.000.000  | Kelurahan Jatiwarna     |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan                | 1 Laporan                                 | 20.000.000  | 1 Laporan                | 25.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Lapora n                 | 50.000.000  | 1 Lapor an                | 50.000.000  | Kelurahan Jatimlati     |
| Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 1 Laporan                | 1 Laporan                                 | 20.000.000  | 1 Laporan                | 25.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Laporan                | 50.000.000  | 1 Lapora n                 | 50.000.000  | 1 Lapor an                | 50.000.000  | Kelurahan Jatimurni     |
| Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                           | Persentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat |                          | 50.000.000                                | 100%        | 20.000.000               | 100%        | 21.036.000               |             | 22.247.674               |             | 23.386.754                 |             | 24.640.285                | 50.000.000  |                         |
| Outcome : Meningkatnya Penanganan Potensi Konflik di wilayah Kecamatan     |                                                                 | 100%                     | 100%                                      |             | 100%                     |             | 100%                     |             | 100%                     |             | 100%                       |             | 100%                      |             |                         |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan                   | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan      | 100%                     | 100%                                      | 50.000.000  | 100%                     | 20.000.000  | 100%                     | 141.000.000 | 100%                     | 150.000.000 | 100%                       | 150.000.000 | 100%                      | 100.000.000 |                         |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan     | 1 Dokumen                | 1 Dokumen                                 | 50.000.000  | 1 Dokumen                | 20.000.000  | 1 Dokumen                | 141.000.000 | 1 Dokumen                | 150.000.000 | 1 Doku men                 | 150.000.000 | 1 Doku men                | 100.000.000 |                         |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                         | Persentase wilayah tertib                                       |                          | 100%                                      | 500.896.000 | 100%                     | 400.000.000 | 100%                     | 555.000.000 | 100%                     | 400.000.000 | 100%                       | 400.000.000 | 100%                      | 400.000.000 |                         |
| Outcome : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum |                                                                 | 100%                     | 100%                                      |             | 100%                     |             | 100%                     |             | 100%                     |             | 100%                       |             | 100%                      |             |                         |



| Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program/ Kegiatan/ SubKegiatan                                                                                                           | Baselin e 2024 | TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Ket |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----|
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                | 2025                                      |                | 2026       |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                | Target                                    | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             |     |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pondokmelati                                  | 100%           | 100%                                      | 500.896.000    | 100%       | 400.000.000    | 100%       | 555.000.000    | 100%       | 555.000.000    | 100%       | 555.000.000    | 100%       | 555.000.000    |     |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan      | 1 Laporan                                 | 60.000.000     | 1 Laporan  | 50.000.000     | 1 Laporan  | 155.000.000    | 1 Laporan  | 155.000.000    | 1 Laporan  | 155.000.000    | 1 Laporan  | 155.000.000    |     |
| Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)                                         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat                                                             | 12 Laporan     | 12 Laporan                                | 436.972.000    | 12 Laporan | 350.000.000    | 12 Laporan | 400.000.000    | 12 Laporan | 400.000.000    | 12 Laporan | 400.000.000    | 12 Laporan | 400.000.000    |     |
| TOTAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |                                           | 27.994.480.170 |            | 34.730.587.000 |            | 36.310.349.566 |            | 38.402.362.013 |            | 40.292.602.804 |            | 41.912.281.194 |     |

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappeditbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS                                         | OUTCOME                                                            |     | KEGIATAN/SUB KEGIATAN KECAMATAN                                                                                                                                     | KET. |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Meningkatnya efektivitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan |     |                                                                                                                                                                     |      |
|    |                                                           |                                                                    | 1.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                       |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan                                                                                |      |
|    |                                                           |                                                                    | 1.2 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                                                         |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokmelati |      |
| 2  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | Meningkatnya LKM yang mendukung pelayanan publik                   |     |                                                                                                                                                                     |      |
|    |                                                           |                                                                    | 2.1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                     |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan                                                                      |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                  |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)                                                                                                   |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                |      |
|    |                                                           |                                                                    | 2.2 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                               |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                              |      |
|    |                                                           |                                                                    |     | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                    |      |

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diolah

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati dilakukan dengan Merujuk pada indikator yang telah diseleksi dan relevan terhadap sasaran pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria. Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan Ketertiban masyarakat, indikator yang digunakan antara lain: *Persentase Peningkatan Zona Tertib di Wilayah Kecamatan*, dan *Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib*. Indikator-indikator ini menjadi daya ungkit untuk Sasaran Kota Bekasi Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima, indikator yang digunakan meliputi *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di*

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



Kecamatan Pondokmelati, Profil Kelurahan yang terbaharui, dan Persentase LKM yang aktif. Indikator-indikator tersebut dipilih karena mencerminkan secara langsung tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diterima oleh masyarakat serta sejauh mana peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelayanan public.

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bekasi tersebut, maka target IKU Kecamatan Pondokmelati seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

| No. | Indikator                                                            | Baseline 2024 | Satuan | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ket. |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1   | 2                                                                    | 3             | 4      | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
| 1   | Persentase LKM Aktif yang mendukung pelayanan publik                 | n/a           | Persen | 65%  | 67%  | 69%  | 71%  | 73%  | 75%  |      |
| 2   | Persentase Peningkatan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati | n/a           | Persen | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 0,35 | 0,35 | 0,40 |      |

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

4.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan ditetapkan sebagai tolok ukur utama dalam mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur secara jelas hasil serta dampaknya bagi masyarakat. Indikatornya meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya aparatur, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah. Dengan adanya indikator yang terukur, Kecamatan dapat menampilkan capaian kinerja secara periodik, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan menyusun strategi perbaikan yang tepat guna mendorong tata kelola

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |



pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, indikator kinerja kunci berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang memastikan transparansi pelaksanaan program pembangunan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan. Dibawah ini disajikan Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pondokmelati:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

| No | INDIKATOR                                                                      | STA<br>TUS    | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|    |                                                                                |               |        |                        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| -1 | -2                                                                             | -3            | -4     | -5                     | -6           | -7   | -8   | -9   | -10  | -11  | -12 |
| 1  | 7.01 -<br>KECAMATAN                                                            |               |        |                        |              |      |      |      |      |      |     |
| 2  | Persentase LKM<br>yang aktif                                                   | kom<br>ulatif | %      | 100                    | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 3  | Persentase<br>Penanganan<br>Kasus<br>Perselisihan<br>dan Konflik<br>Masyarakat | kom<br>ulatif | %      | 100                    | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 4  | Persentase<br>Peningkatan<br>Kepuasan<br>Masyarakat di<br>Kecamatan            | kom<br>ulatif | %      | 100                    | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |
| 5  | Persentase<br>Wilayah Tertib                                                   | kom<br>ulatif | %      | 100                    | 100          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |     |

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2025-2029, diolah

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Paraf Koordinasi      |  |
| Camat Pondokmelati    |  |
| Kepala Bappelitbangda |  |
| Kabag Hukum           |  |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Pondokkelati Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029. Selain dijadikan pedoman, Renstra Tahun 2025-2029 ini mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, program perangkat daerah, pagu indikatif, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pondokkelati mulai tahun 2026 hingga tahun 2030 yang merupakan tahun transisi;
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit Kerja lingkup Kecamatan Pondokkelati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pondokkelati 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha di lingkungan Kota Bekasi diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan;
2. Dalam menyusun Renstra PD, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik, dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing

Bekasi, 2025  
Camat Pondokkelati,

  
Heryanto, A.P., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750717 199603 1 003